

Swantara

Majalah Triwulanan Lemhannas RI No. 09 TAHUN III/JUNI 2014



OPINI

- Maizar Rahman
**Tantangan Pimpinan Nasional dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia**
- Syafran Sofyan
**Tantangan Pimpinan Nasional dalam
Menghadapi Era Perdagangan Bebas**
- Azyumardi Azra
Menuju Pendidikan Humanis

SUKSESI PIMPINAN NASIONAL:

**ANTARA OASE DAN
FATAMORGANA**

Segenap staf redaksi
Majalah Swantara
mengucapkan
selamat menunaikan
ibadah puasa Ramadhan 1435 H





Pelindung
Budi Susilo Soepandji

Pembina
Dede Rusamsi

Pengarah
Boy Salamuddin

Penasehat
Leonardi
M. Nasir Madjid

Kontributor Ahli
Dadan Umar Daihani, Njaju Jenny
Rosita S. Noor, Miyasto

Pemimpin Redaksi
E. Estu Prabowo

Redaktur Pelaksana
Maghoni

Editor
Trias Noverdi, B. Iman Aryanto

Staf Redaksi
Yusita Pusparini, Triana Rahmawati,
Endah Heliana, Aska Leonardi

Koordinator Fotografer
M. Isdar

Fotografer
Suryadi

Grafis
PT. Yellow Multi Media

Pemimpin Administrasi
Sumurung

Staf Administrasi
Linda Purnamasari, Gatot

Sirkulasi
Supriyono

Alamat Redaksi
Lemhannas RI
Jl. Medan Merdeka Selatan No.10 Jakarta
Telp. (021) 3832108, 3832109
Fax (021)-3451926
Email : humas.lemhannasri@gmail.com
Website : www.lemhannas.go.id
Dicetak oleh : PT. Yellow Multi Media
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Swantara menerima artikel dan opini dari luar Lemhannas RI dan akan dimuat apabila sesuai dengan kebijakan redaksi

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera,
Om Swastiastu.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya, Majalah Triwulanan Lemhannas RI "Swantara" edisi ke-sembilan bulan Juni 2014 dapat kembali hadir di tengah pembaca.

Pada edisi kali ini, redaksi mengangkat laporan utama dengan topik Sukses Pimpinan Nasional 2014 yang diwujudkan melalui Pemilihan Presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Topik ini merupakan topik yang menarik perhatian seluruh lapisan rakyat Indonesia, mulai dari perkotaan hingga pelosok desa di tanah air, mengingat suksesi pemimpin nasional kali ini akan menentukan masa depan bangsa Indonesia lima tahun kedepan.

Dalam perspektif Ketahanan Nasional yang dihadapkan pada dinamika globalisasi yang sarat dengan perubahan dan persaingan antar bangsa, bangsa Indonesia membutuhkan sosok pimpinan nasional yang jujur, berkarakter, berkomitmen dan berintegritas serta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai empat konsensus dasar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Untuk itulah, pada edisi ini redaksi mencoba untuk menyajikan pandangan para pakar dari berbagai bidang keilmuan yang menyoroti kriteria sosok pimpinan nasional yang ideal. Redaksi berharap mudah-mudahan berbagai perspektif tersebut bisa membuka mata masyarakat, sekaligus mendorong lahirnya pemimpin nasional dengan karakter negarawan yang didambakan oleh segenap rakyat.

Edisi Majalah Swantara kali ini juga dilengkapi dengan sisipan khusus tentang rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi Lemhannas RI ke empat puluh sembilan pada tanggal 20 Mei 2014 yang lalu.

Semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera,
Om Shanti Shanti Shanti Om.

Pemimpin Redaksi

Surat Pembaca



Jakarta, -Sebagai lembaga yang mempunyai misi menjadi *world class institution*, sudah seharusnya kebersihan di lingkungan Lemhannas RI mendapat perhatian yang lebih. Perhatian lebih ini dapat dilakukan salah satunya adalah dengan lebih memperhatikan kondisi tempat pembuangan sampah yang terdapat di sebelah gedung Panca Gatra.

Hal ini penting, mengingat bau tak sedap yang ditimbulkan dari tempat pembuangan sampah tersebut sangatlah mengganggu. Terkadang sampah yang menumpuk di sana sudah melebihi kapasitas daya tampung sehingga berserakan kemana-mana.

Selain itu, banyak kotoran di sekitaran tempat pembuangan sampah tersebut. Semoga dengan surat ini dapat menjadi bahan koreksi untuk ke depannya, sebab lingkungan yang sehat dapat berdampak langsung terhadap kinerja pegawai di lingkungan Lemhannas RI.

Triana Rahmawati

Staf Outsourcing Humas Lemhannas RI.



Jakarta, -Lembaga prestisius sekaliber Lemhannas RI seharusnya menyediakan pelayanan *wi fi* dengan kualitas prima. Pada era teknologi seperti sekarang ini, kebutuhan akan internet sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap orang. Sebagai pegawai pemerintahan, kita selalu dituntut untuk tidak gagap teknologi (*gaptek*). *Wi fi* sangat diperlukan sebagai salah satu upaya dalam mengatasi "kegaptekan."

Lemhannas RI selama ini sudah menyediakan sarana *wi fi* pada masing-masing gedung. Tetapi yang menjadi masalah, sinyal *wi fi* di ponsel atau *notebook* memang penuh, namun ketika akan digunakan ternyata tidak bisa terkoneksi dengan baik. Padahal saya sudah memasukkan *password*, tetapi *wi fi* tetap tidak bisa tersambung. Dari kasus ini, saya menyarankan untuk menaikkan kuota jaringan.

Penggunaan *wi fi* ini penting, mengingat kebutuhan akan informasi, dan kualitas kinerja saya. Tak dapat dipungkiri, pekerjaan saya selama ini sangat tergantung pada internet yang notabene digunakan untuk mengirim dan menerima surat elektronik dari dalam maupun luar Lemhannas RI. Kebutuhan ini sangat mendesak, mohon kiranya menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan kami.

Endah Heliana, S.Sos

Staf Humas Lemhannas RI.

Sejarah

- 6 Sejarah Kepemimpinan Nasional Berbagai Era di Indonesia

Laporan Utama

- 11 Suksesi Pimpinan Nasional: Antara Oase dan Fatamorgana
- 16 Kriteria Pemimpin Nasional Masa Depan
- 17 Memilih Pemimpin Tidak Bisa “Diperjudikan”
- 20 Dibutuhkan Seorang Pemimpin yang Berani Melakukan Revolusi Mental Sesuai Pancasila
- 21 Harus Ada Terobosan Untuk Mengatasi Keterbatasan Anggaran Pertahanan
- 22 Pemerintahan Baru Harus Membawa Perubahan Sesuai Harapan Rakyat
- 24 Menuju Sistem Pendidikan yang Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
- 25 Kepemimpinan yang Kuat dan Berbudaya
- 27 Suksesi Kepemimpinan Nasional Secara Demokratis

Opini

- 28 Tantangan Pemimpin Nasional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia
- 30 Tantangan Pemimpin Nasional Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas
- 32 Menuju Pendidikan Humanis

Harapan Peserta

- 35 Urgensi Peningkatan Pendidikan Politik Pemilu
- 35 Media Massa dan Keberpihakan Dalam Pemilu
- 36 Pemerintah Baru Perlu Membuat Kebijakan yang Terintegrasi
- 36 Pemimpin Nasional Mampu Mengambil Kebijakan Berdasar Kepentingan Nasional

Hot Issue

- 38 Pemprov DKI Tertibkan PKL di Monas Lewat Pergub Baru
- 39 Iraq dan Isis: Bukan Perang Syiah dan Sunni

Seputar Kita

- 40 Menjawab Permasalahan Kebangsaan Melalui Dialog Kebangsaan Pimpinan Tingkat Nasional
- 41 Rangkaian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI di Daerah

Profil

- 42 Bayu Adjie Pratama: Manajemen Waktu dan Kedisiplinan, Awal Menuju Keberhasilan”

Suara Alumni

- 44 Jiwa Nasionalisme yang Dimiliki Para Atlet Sangat Besar
- 44 Mencari Pemimpin yang Kreatif dan Inovatif
- 45 Pembangunan Infrastruktur Demi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
- 45 Pemimpin yang Mampu Memberikan Teladan

Sosok

- 47 Guru Kembar, Rossy dan Rian Menanamkan Budi Pekerti Kepada Anak-anak Jalanan

Serambi Monas

- 50 Kisah Lima Sekawan





“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” – (Bung Karno)

kepakgaruda.wordpress.com

Sejarah Kepemimpinan Nasional Berbagai Era di **INDONESIA**

Kutipan pidato Bung Karno di atas memiliki refleksi yang mendalam tentang arti perjuangan bagi seorang pemimpin. Soekarno hadir sebagai seorang *founding fathers* bangsa yang mengetahui betul keadaan bangsanya pada saat itu, ia juga berusaha memberikan proyeksi terhadap tantangan yang akan dihadapi oleh penerus-penerusnya.

Kepemimpinan selalu menarik untuk dibahas. Kepemimpinan merupakan faktor penentu hidup, berkembang, juga matinya suatu

organisasi, di segala sektor baik yang menyangkut kepemimpinan tunggal ataupun kolektif. Kepemimpinan nasional menjadi salah satu faktor strategis dan menentukan dalam proses pembangunan nasional dan penyelesaian masalah bangsa.

Tanpa kepemimpinan yang baik dalam pengelolaan sebuah negara, terutama Indonesia sebagai bangsa yang multi etnis dengan kondisi geografis wilayah negara yang berbentuk kepulauan, negeri ini amat rentan terhadap guncangan sosial dan politik

yang dapat berujung kepada perpecahan dan disintegrasi bangsa

Pada edisi 9 kali ini, redaksi Swantara akan membahas kepemimpinan nasional dengan beragam tantangan yang dihadapi dari berbagai era pemerintahan.

Era Politik Etis dan Kebangkitan Nasional

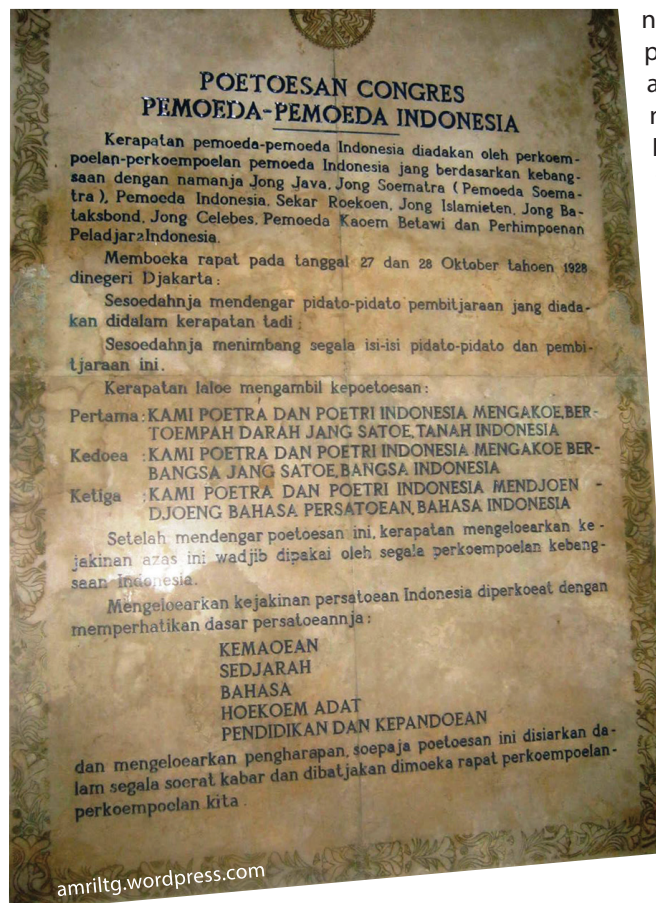
Era ini dimulai sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di mana Belanda merubah arah kebijakannya terhadap Hindia Belanda. Kebijakan

kolonial ini dinamakan politik etis, yang menganggap Hindia Belanda tidak lagi sebagai daerah jajahan yang harus dieksploitasi habis-habisan, melainkan perlu ditingkatkan kualitas pribuminya. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kelompok masyarakat yang tahu berterima kasih, dan bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Sehingga akhirnya terbentuk suatu keteladanan yang akan menjiwai masyarakat golongan bawah.

Politik etis memperkenalkan golongan bangsawan pribumi untuk mengenyam pendidikan. Dari kebijakan inilah kemudian bermunculan pribumi-pribumi terpelajar yang kelak membawa perubahan berarti bagi Hindia Belanda. Pada era ini didirikan sekolah-sekolah seperti *Opleidingsscholen voor inlandsche ambtenaren* (OSVIA), atau sekolah pelatihan untuk pejabat pribumi, dan juga *School tot opleiding van inlandsche artsen* (STOVIA), atau sekolah untuk dokter-dokter pribumi.

Kondisi demikian memunculkan perkembangan baru mengenai organisasi, dan dikenalnya definisi-definisi tentang identitas. Pada era inilah mulai terbentuk kepemimpinan nasional, dan suatu kesadaran diri yang baru. Namun bukan berarti tanpa kendala, para pemimpin yang baru ini justru terlibat dalam pertentangan yang sengit satu sama lain. Sedangkan kesadaran diri yang semakin besar telah memecah belah kepemimpinan di era ini menurut identitas agama, budaya, dan ideologi masing-masing.

Permasalahan lain yang harus dihadapi oleh kepemimpinan nasional di era politik etis adalah sulitnya upaya pencerdasan masyarakat pada saat itu, akibat kultur yang sudah terbentuk sejak lama. Adalah Kartini (1879-1904), seorang yang gigih memperjuangkan persamaan hak bagi perempuan pribumi untuk mengenyam pendidikan layaknya kaum pria.



amriltg.wordpress.com

Puncak dari era politik etis adalah berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908, sebagai sebuah organisasi modern pertama di Hindia Belanda. Walaupun demikian, organisasi ini bukanlah berbasis politik, ranah pergerakannya hanya sebatas sosial, dan kebudayaan. Saat ini, berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Era Sumpah Pemuda

Kepemimpinan nasional di era Sumpah Pemuda sudah mulai menyadari arti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nama Indonesia sebagai sebuah identitas nasional sudah mulai dipakai, menggantikan nama Hindia Belanda.

Pada era ini tertanam semangat kerja sama antar perkumpulan, untuk menjadi dasar bagi persatuan Indonesia. Wujud nyata dari upaya kepemimpinan

nasional dalam mem-persatukan Indonesia adalah diselenggarakannya Kongres Pemuda Indonesia II. Kongres ini menghasilkan sumpah yang terkenal dengan nama Sumpah Pemuda. Isinya tiga sendi persatuan Indonesia, yaitu persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa. Dalam kongres juga diperkenalkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, dan Bendera Merah Putih yang dipandang sebagai bendera pusaka bangsa Indonesia.

Namun demikian, tantangan yang harus dihadapi di masa ini adalah semakin kerasnya sikap penjajah Belanda

terhadap segala aktivitas organisasi bumiputera. Banyak organisasi yang akhirnya memutuskan tidak turut serta dalam bidang politik, dan anggotanya pun dilarang melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan politik. Cara ini ditempuh agar tidak dicurigai oleh penjajah Belanda.

Tekanan dan kekangan penjajah Belanda terhadap organisasi bumiputera seperti misalnya kesulitan untuk mendapat pekerjaan, menyebabkan banyak anggota yang keluar dari organisasinya. Hingga akhirnya pada Kongres Pemuda Indonesia III memutuskan mengenai kata "kemerdekaan nusa dan bangsa" diganti dengan "menjunjung martabat nusa dan bangsa." Ini disebabkan kata kemerdekaan tersebut tabu bagi penjajah Belanda.

Era Revolusi Kemerdekaan Indonesia

Masuknya Jepang ke Indonesia pada awal perang dunia ke-2 memberi pengaruh secara langsung ter-



yang baru terbentuk ini pun juga telah dilakukan secara “legal” melalui pembentukan negara-negara kecil di nusantara yang menyatu dalam negara Republik Indonesia Serikat (RIS) hasil perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949.

Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika yang merupakan empat konsensus dasar bangsa benar-benar diuji pada era ini. Kepemimpinan nasional era Orde Lama harus mampu mempertahankan eksistensi negara Indonesia agar tidak menimbulkan potensi ke arah perpecahan bangsa.

hadap pergerakan kepemimpinan nasional pada saat itu. Tokoh-tokoh nasional Indonesia bersedia melakukan kerja sama dengan pihak pendudukan Jepang.

Pada mulanya, sikap ini ditempuh untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Dalam usaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia, para pemimpin nasional bersedia mengerahkan segala potensi yang dimiliki Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan perang. Berjalan seiringnya waktu, Pihak Jepang mulai menyadari kerja sama tersebut lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada pihaknya sendiri. Alih-alih membantu Jepang, kepemimpinan nasional justru mengarahkan perhatian rakyat kepada kemerdekaan Indonesia daripada membantu pihak Jepang.

Sebenarnya, baik golongan muda maupun tua sama-sama berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan. Namun diantara mereka terdapat perbedaan pendapat tentang cara pelaksanaan proklamasi. Golongan tua berpendapat bahwa Indonesia

dapat merdeka tanpa pertumpahan darah jika tetap bekerjasama dengan Jepang.

Sikap ini tidak disetujui oleh golongan muda yang lebih sepatutnya dengan sebuah revolusi untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan kekuatan sendiri dan sama sekali lepas dari keterlibatan Jepang.

Puncak dari kepemimpinan nasional era revolusi kemerdekaan adalah dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang berlangsung pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di pertengahan bulan Ramadhan.

Era Orde Lama

Di masa awal kemerdekaan, keadaan Indonesia sangatlah tidak stabil. Kedaulatan negara terhadang oleh berbagai masalah yang timbul, baik itu disebabkan oleh pemberontakan bangsa sendiri, atau pun agresi yang dilakukan oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.

Pemberontakan demi pemberontakan terjadi di beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Upaya pecah-belah negara

yang baru terbentuk ini pun juga telah dilakukan secara “legal” melalui pembentukan negara-negara kecil di nusantara yang menyatu dalam negara Republik Indonesia Serikat (RIS) hasil perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949.

Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika yang merupakan empat konsensus dasar bangsa benar-benar diuji pada era ini. Kepemimpinan nasional era Orde Lama harus mampu mempertahankan eksistensi negara Indonesia agar tidak menimbulkan potensi ke arah perpecahan bangsa.

Kepemimpinan nasional di masa ini mengalami jatuh bangun kabinet dalam waktu yang relatif singkat, akibat diberlakukannya Sistem Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin secara bergantian.

Namun di tengah cobaan yang dihadapi, kepemimpinan nasional era Orde Lama berhasil merebut Irian Barat dari Belanda, dan berperan besar dalam penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika, serta ikut memprakarsai pembentukan Gerakan Non-Blok.

Kepemimpinan Orde Lama dengan gaya khas seorang orator dan diplomat ulung, Soekarno dapat dipandang berhasil mempertahankan keutuhan NKRI melalui berbagai langkah strategis, baik kedalam negeri maupun ke tataran diplomasi internasional. Kondisi ketahanan nasional tetap terjaga hingga kepada pergantian rezim di tahun 1966/67.



www.seasite.niu.edu

Era Orde Baru

Orde baru terbentuk dengan dukungan yang sangat besar dari kelompok-kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Menurut Ricklefs (p. 558) terdapat persamaan antara kebijakan Orde Baru dengan kebijakan kolonial pada periode politik etis. Sebagaimana pemerintah kolonial Belanda dahulu, Orde Baru juga berjanji akan membangun ekonomi nasional dan meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan.

Saat era kepemimpinan Soekarno jatuh dan kemudian digantikan oleh Soeharto, sang jenderal memanfaatkan Golkar (Golongan Karya) dalam pemilihan umum (pemilu). Sederetan aktivis pergerakan, intelektual, serta para pendukung Orde Baru diminta untuk mengambil alih Sekretariat Bersama Golkar. Kepemimpinan lama

digeser dengan kepemimpinan yang pro Orde Baru.

Dalam mengatasi pergolakan bernuansa disintegrasi, pemerintahan Orde Baru lebih mengedepankan gaya militer-otoriteristik melalui berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Bahkan untuk membasmi tindak kriminalitas dan premanisme, pimpinan nasional saat itu menerapkan pola penghilangan paksa ala militer melalui satuan khusus bawah tanah, petrus (penembak misterius) yang menghasilkan matius (mati misterius). Keberadaan Kopkamtib (Komando Operasional Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) dan Kantor Sosial Politik di daerah-daerah menjadi alat "pengamanan" yang difungsikan tidak hanya sebagai strategi preventif-represif tapi juga sebagai komponen petugas penindakan dan *recovery* terhadap tindakan yang mengarah kepada pengancam ketahanan nasional.

Meskipun Orde Baru banyak menjanjikan pembangunan ekonomi nasional serta perbaikan pendidikan dan kesejahteraan, gaya pemerintahannya bersifat paternalistik dan banyak

hasilnya berada di tangan pengusaha asing. Industri lokal hanya bertumbuh sedikit. Kekuasaan ekonomi, politik, administrasi, dan militer di tangan sekelompok elite kecil di bawah Soeharto mungkin lebih terpusat.

Era Reformasi – Sekarang

Orde Baru berakhir, digantikan dengan Orde Reformasi sejak 1998 dan masih berjalan hingga saat ini. Pada kurun waktu 13 tahun masa Reformasi ini, telah muncul silih berganti 4 presiden di republik ini, Baharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhono.

Reformasi di tahun 1998, merupakan gerakan moral untuk menjawab ketidakpuasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Reformasi bertujuan untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasar-

kan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi. Tujuan lahirnya gerakan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Namun demikian, harapan tidaklah semanis kenyataan. Banyak penyimpangan yang terjadi di masa

reformasi. Misalnya dalam konteks kesejahteraan, banyak orang yang tidak sanggup melongok kembali ke masa pemerintahan Orde Baru, walaupun banyak kekurangan, rezim ini dianggap lebih kompeten memenuhi kebutuhan dasar rakyat, seperti pangan dan sandang, dibanding dengan pemerintah masa reformasi.

Selain itu, Berdasarkan fenomena lapangan yang ada di masyarakat, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan nasional di era reformasi ini relatif kurang efektif dikaitkan dengan peningkatan ketahanan nasional. Hal itu dapat terlihat dari masih adanya dinamika disintegrasi yang muncul akibat masih tingginya angka kemiskinan, kemelatan, dan kebodohan di masyarakat Indonesia.

Kepemimpinan nasional mengalami penurunan kualitas. Hal ini terlihat dari berbagai kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik telah merata di seluruh lembaga negara, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Itu membuktikan bahwa penurunan kualitas kepemimpinan nasional telah terjadi. Pejabat publik, yang seharusnya memberi contoh kepada masyarakat untuk keluar dari krisis nasional, telah keluar dari nurani kebangsaannya. Kepekaan terhadap pertanggungjawaban publik sudah hilang. Para pejabat tinggi pada instansi-instansi strategis bukannya memberi keteladanan, melainkan mempertontonkan perilaku buruk dalam mengelola otoritas publik.



store.tempo.co



Sukses Pimpinan Nasional: Antara Oase dan Fatamorgana

Sukses Pimpinan Nasional yang berlangsung 9 Juli 2014 merupakan sebuah proses pencarian nakhoda ulung. Seorang nakhoda dengan bekal kompas berupa empat konsensus dasar bangsa, dan memiliki kemampuan mengorganisir para menterinya dengan baik, serta melindungi dan menjaga keselamatan rakyatnya, untuk menghantarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya.

Dengan demikian, menjadi pimpinan nasional tidaklah mudah. Ada kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh pimpinan nasional, sebagai seorang yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang tengah mendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sukses Pimpinan Nasional

bagaikan sebuah oase penyejuk bagi rakyat Indonesia. Sebuah harapan untuk perubahan yang lebih baik lagi, dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Dalam menilai kualitas dan kapasitas pimpinan nasional inilah Lemhannas RI memiliki sejumlah kriteria yang dinamakan Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI). IKNI diharapkan dapat menjadi instrumen rasional dan terukur bagi seluruh lapisan masyarakat di dalam menjalankan hak konstitusionalnya, untuk menentukan pilihan pada Sukses Pimpinan Nasional.

Kriteria-kriteria dalam IKNI terdapat empat variabel, yang pertama adalah Indeks Moralitas Akuntabilitas Individual, ketika pimpinan nasional mempunyai sifat kepemimpinan yang

berintegritas terhadap dirinya sendiri. Pimpinan Nasional memiliki ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etika dan nilai-nilai personal yang jelas, memiliki nilai kejujuran dan integritas yang tinggi, serta mampu menyampaikan pemikiran-pemikirannya secara jernih.

Kedua adalah Indeks Moralitas Akuntabilitas Sosial, ketika pimpinan nasional memiliki sifat kepemimpinan yang berintegritas terhadap masyarakat. Pimpinan nasional dapat membangun simpati dan dapat diterima oleh masyarakat yang dipimpinnya, selalu bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya, serta mampu menggali karakter kepemimpinan yang bersumber dari nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Ketiga adalah Indeks Moralitas Akuntabilitas Instiusional, ketika pimpinan nasional memiliki sifat kepemimpinan yang berintegritas terhadap negaranya. Selalu taat pada konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku, setia pada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, serta konsisten terhadap cita-cita dan tujuan nasional yang berwawasan nusantara.

Keempat adalah Indeks Moralitas Akuntabilitas Global, ketika pimpinan nasional merupakan sosok yang diakui dalam pergaulan internasional. Memiliki wawasan regional dan global dengan semangat membangun kepemimpinan bersama, paham dan konsisten akan politik luar negeri bebas aktif, memiliki karakter negarawan yang karya dan kepribadiannya dihormati oleh negara lain, serta mampu meningkatkan kedudukan Indonesia di mata internasional dengan tidak mengorbankan jatidiri nasional dalam menghadapi globalisasi.

IKNI adalah upaya konkrit yang dilakukan oleh Lemhannas RI guna mengajak masyarakat untuk selalu rasional di dalam memilih sosok pimpinan nasional. Masyarakat diharapkan untuk tidak memilih pimpinan nasional hanya dengan harapan 'semoga baik,' atau memilih secara emosional. Nasib bangsa ini tidak bisa didasarkan pada konsep kualitas kepemimpinan yang bernuansa coba-coba atau *trial and error*.

"Suksesi pimpinan nasional ini diharapkan mampu mencetak pemimpin yang bertindak sebagai *problem solver* dalam memecahkan persoalan bangsa, dan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya", ucap Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepanji, D.E.A.

Pelaksanaan momen bersejarah yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut diharapkan dapat berlangsung dengan baik, sehingga mampu memunculkan sosok pemimpin yang



dinantikan oleh rakyatnya, serta mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

"Saya berharap nantinya kepada yang menang jangan mengunggulkan diri, begitu juga kepada pihak yang kalah harus menerima kekalahannya secara legowo, agar stabilitas nasional terjaga sehingga pembangunan nasional dapat berlanjut," tambah Budi Susilo Soepandji.

Namun demikian, kita tidak bisa menampik adanya suatu kondisi dimana masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional. Ketidakpercayaan ini terjadi akibat maraknya penyimpangan yang terjadi di masa

lalu, seperti monopoli kekuasaan, dan juga rendahnya Akuntabilitas, Moralitas, Transparansi, serta Integritas pemerintahan pada saat itu.

Tapi tidak semua hal harus dibuang begitu saja. Ada pelajaran politik yang dapat kita petik dari masa lalu, jika kita melihatnya dengan cara pandang positif. Mengenai hal ini, Prof. Dr. H. Muladi, S.H. mengatakan "Politik bagi-bagi kue" merupakan sesuatu yang normal dalam transaksi politik, asal tujuannya positif dalam rangka pencapaian cita-cita, tujuan, dan kepentingan nasional. Meskipun demikian, kegiatan politik tetap harus didasarkan atas prinsip atau parameter profesionalisme, tanpa mengorbankan kepentingan bangsa dan negara.

Adanya konflik internal partai di dalam mengusung calon pimpinan nasional adalah suatu hal yang wajar. Akan tetapi, hal tersebut dapat memperlihatkan bahwa partai politik belum menjalankan tujuan dan fungsinya secara baik. Pimpinan parpol yang seharusnya sebagai *"central figure"* yang ditaati kebijakannya, menjadi kontradiktif dan bias.

Anggota partai masih belum memahami tujuan dan fungsi partai politik yang harus dihayati secara kolektif, yakni mewujudkan cita-cita nasional, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Muladi menambahkan, untuk mengatasi berbagai pelanggaran proses pemilu yang lalu agar tidak terjadi lagi di masa depan, khususnya kecurangan dan *"money politics"* di samping diperlukannya penegakkan hukum yang tegas dan pasti, adil dan proporsional, diperlukan pendidikan politik bahwa pemilu yang jujur dan adil (*free and fair election*), merupakan salah satu nilai dasar keberadaban dan demokrasi.

Senada dengan Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Ketua Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR), H. Sidarto Danusubroto mengatakan proses demokrasi yang selama ini dijalankan oleh para penyelenggara negara kurang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Tentu saja hal ini kemudian berimbas pada proses penyelenggaraan negara dan dampak yang tercermin pada perilaku masyarakat terhadap penyelenggara negara.

Hal ini kemudian terlihat dari kualitas penyelenggaraan pemilihan legislatif pada 9 April lalu yang membuat kita prihatin, karena terindikasi begitu masifnya praktik politik uang. Banyak kalangan berpendapat bahwa Pileg 2014 adalah Pileg terburuk yang pernah ada dalam sejarah demokrasi Indonesia. Kita tahu bahwa amandemen konstitusi adalah bagian dari upaya untuk melakukan perombakan sistem. Akan tetapi, ketika hasil perombakan sistem itu dipraktikkan, ternyata capaiannya tidak sesuai harapan.

"Oleh karenanya, perombakan sistem (institusional) harus diikuti dengan perombakan mentalitas mereka yang diberikan otoritas kepadanya untuk menjalankan sistem tersebut," jelas Sidarto.

Kondisi yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang sulit untuk ditepis, sehingga gagasan revolusi mental yang penekanannya ditujukan kepada para penyelenggara negara, dapat menjadi sebuah alternatif dalam upaya mengatasi sistem yang tidak berjalan dengan baik atau macet dan menghambat pencapaian tujuan.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sendiri bersifat definitif. Konotasinya adalah satu-satunya tolok ukur untuk menilai sejauh mana elemen-elemen terkait, yaitu negara, penyelenggara negara, dan warga negara secara bersungguh-sungguh menginginkan tegaknya keadilan dan keberadaban dengan berbagai konsekuensi apapun.

Wujudkan Kekuatan Pertahanan yang Tangguh

Selain banyaknya persoalan di ranah politik dan hukum yang harus diselesaikan oleh Pimpinan Nasional mendatang, Pengamat Pertahanan UI, Dr. Edy Prasetyono berharap pimpinan nasional mendatang mempunyai visi dan misi untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara di kawasan Asia Pasifik dengan kekuatan pertahanan yang tangguh.



Guna mewujudkan hal tersebut, konsep yang dikembangkan sebaiknya tidak mengacu kepada cara berpikir ekonomis semata. Pertahanan jangan dipandang sebagai sektor konsumtif yang tidak produktif, tetapi harus melihat kepada implikasi yang ditimbulkan.

"Pertahanan itu sesuatu yang konsumtif. Iya, karena kita harus menghabiskan biaya besar untuk membeli berbagai kebutuhan pertahanan. Bisa menghabiskan 70-80 triliun rupiah. Tapi cara melihatnya jangan seperti itu, kepentingan apa yang bisa dilindungi dari situ, besar sekali," tutur Edy.

Namun demikian, Edy tidak menampik adanya keterbatasan anggaran pertahanan. Perlu adanya terobosan-terobosan agar pembangunan kekuatan pertahanan dapat terus berjalan. Sebab, pembangunan kekuatan pertahanan menjadi hal penting dan tidak bisa ditunda lagi, mengingat waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan kekuatan pertahanan Indonesia yang tangguh tidaklah sebentar.

Perlunya menyusun strategi dan kebijakan ekonomi secara matang

Direktur *Institute for Development of Economic and Finance (INDEF)*, Enny Sri Hartati menjelaskan bahwa Sukses Pimpinan Nasional secara tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Enny menyarankan agar pimpinan nasional yang baru dapat menyusun strategi dan kebijakan ekonomi secara matang untuk lima tahun mendatang.

Sebenarnya, potensi sumber kekayaan alam (SKA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Indonesia sangat besar, namun hingga saat ini belum dapat merealisasikan yang sesuai target yang diinginkan. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah seperti konsistensi didalam membuat dan menerapkan kebijakan, komitmen serta sinergisitas antar sektor atau lembaga serta pusat dan daerah.

Sementara itu, pimpinan nasional mendatang, target lima tahun ke depan menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai visi dan misi yang diembannya. Guna mencapai target kinerja perekonomian dibutuhkan intervensi kebijakan yang tepat. Jika pemerintah tidak melakukan strategi dan kebijakan yang *fundamental*, maka Indonesia akan berlutat pada persoalan yang sama, dan akan terjebak pada *middle income trap*.

Dengan kompleksitas masalah yang tengah dihadapi Indonesia saat ini, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Prof. Dr. Siti Zuhro menyaratkan bahwa pimpinan nasional harus mampu mengelola "ke-Indonesiaan" dan "kedaerahan" yang dilakukan secara berimbang dan efektif, sehingga menghasilkan energi yang positif untuk mendorong akselerasi pembangunan di Indonesia yang belakangan ini tampak menghadapi banyak kendala.

Sejatinya, seorang pemimpin harus menjadi *problem solver* dalam menyelesaikan segala permasalahan yang membelit negaranya. Namun ironisnya, dalam beberapa dekade terakhir kepemimpinan nasional tidak menunjukkan tanda-tanda ke arah situ. Padahal, kriteria dasar seorang pemimpin selain sebagai *problem solver*, mereka juga harus memiliki visi dan pandangan jauh ke depan, dapat mengarahkan atau memobilisasi rakyat dalam mencapai tujuan, punya kecerdasan emosional, serta memiliki rasa empati yang tinggi.

Pemimpin yang terpilih nantinya harus mampu menjadi sosok pemimpin yang memiliki integritas, kredibel dan senantiasa berpihak kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan guna mewujudkan cita-cita serta semangat Proklamasi Kemerdekaan.

Dengan demikian, kita patut berharap bahwa hasil sukses pimpinan nasional yang digelar tahun 2014 ini mampu melahirkan sistem, yang

dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas keterwakilan dan akuntabilitas politik.

Sementara dalam konteks bernegara, ujar Siti, ikon "Membangun Indonesia dari Daerah" dapat dijadikan sebagai sesuatu yang baru, pasca kepemimpinan Orba. Sejak tahun 2001, Indonesia sendiri sudah menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi berbasis otonomi daerah.

Dengan sistem baru seperti ini, para pemimpin daerah tingkat II maupun pemimpin daerah tingkat I yang berprestasi berhasil dalam memimpin daerahnya tidak cukup hanya sekedar diberikan penghargaan berupa "Autonomy Award" atau penghargaan semisal itu. Sudah saatnya mereka didorong untuk menyiapkan diri memimpin negeri ini sehingga akan memunculkan sirkulasi elite nasional dan mampu memunculkan pluralisme calon pemimpin di Indonesia.

Budaya Meritokrasi Sebagai Bagian dari Sistem Pendidikan Nasional

Pakar Pendidikan, Prof. Dr. Har Tilaar mengatakan bahwa bangsa yang maju dapat dilihat dari pendidikannya. Sebagai seorang yang lama berkecimpung di dunia pendidikan, tentu saja fakta dan data tentang pendidikan membuat Har Tilaar merasa prihatin. Oleh karenanya, menjelang sukses pimpinan nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2014, dirinya berharap kepada pemimpin terpilih agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di tanah air melalui Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

"Melalui Sisdiknas, harus dilaksanakan penanaman serta penghayatan dan pengembangan sikap serta nilai-nilai kebangsaan di dalam proses belajar atau kurikulum pendidikan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi," harap Har Tilaar.

Sistem serta proses pendidikan yang demikian, menurut Har Tilaar, disebut sebagai pendidikan humanis. Pendidikan humanis bukan pendidikan

yang mementingkan daya pikir, tetapi yang tidak kurang pentingnya adalah menekankan kepada kehidupan bersama dalam mewujudkan nilai-nilai nasional atau identitas bangsa Indonesia.

Pengenalan dan penghayatan serta perwujudan nilai-nilai kebhinnekaan bangsa Indonesia belum sepenuhnya terwujud, bahkan mulai meredup. Apa yang ditekankan di dalam kehidupan bersama Bangsa Indonesia selama ini, bukannya nilai-nilai persatuan, tetapi lebih menekankan kepada nilai-nilai perbedaan.

Dikhawatirkan, meredupnya pengembangan dan penghayatan serta perwujudan nilai-nilai kebhinnekaan tersebut, dapat meruntuhkan kesatuan Bangsa Indonesia, mengeburkan Pancasila, dan berakhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan kebudayaan Indonesia melalui pendidikan humanis merupakan upaya perwujudan perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam rangka merealisasikan proklamasi kebudayaan Indonesia sebagai wujud Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Mengenai aspek budaya, Suksesi Pimpinan Nasional di tanah air melalui penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pipres) pada 9 Juli tak bisa dilepaskan dari budaya bangsa yang juga merupakan bagian dari identitas bangsa. Kebanggaan terhadap identitas bangsa yang diiringi dengan memuncaknya rasa nasionalisme yang tinggi dengan sendirinya membawa bangsa itu maju dalam persaingan dunia internasional.

Guru Besar Filsafat UI, Prof. Dr. Toety Heraty mengatakan pentingnya budaya di dalam membangun dunia masa depan yang lebih makmur dan aman dalam suatu pembangunan yang berkelanjutan. Kebudayaan adalah sarana yang esensial di dalam pembangunan berkelanjutan, kebudayaan menjamin kebersamaan, toleransi, kerjasama, dalam mem-

bangun suatu masyarakat yang lebih makmur, bahagia, dan merata.

Pembangunan kebudayaan itu sendiri dimulai melalui pembangunan pribadi yang terarah, dan ditujukan kepada pembangunan kebudayaan yang dimulai dari budaya lokal, nasional, serta meningkat pada regional, dan internasional.

Oleh karenanya, bangsa ini juga perlu menata ulang sistem dalam menunjuk pimpinan nasionalnya. Dalam hal ini, diperlukan adanya meritokrasi kepemimpinan. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus

“Saya berharap nantinya kepada yang menang jangan mengunggulkan diri, begitu juga kepada pihak yang kalah harus menerima kekalahannya secara legowo, agar stabilitas nasional terjaga sehingga pembangunan nasional dapat berlanjut,” jelas Budi Susilo Soepandji.

membuka kesempatan untuk dapat memunculkan regenerasi pemimpin baru, tidak lagi bertumpu pada level struktural lembaga pemerintahan, tetapi juga mengikutsertakan setiap segmen sektor kehidupan masyarakat.

Seleksi kepemimpinan harus bertumpu pada prestasi, apa yang sudah mereka lakukan melalui rekam jejaknya saat dirinya memimpin. Bukan karena dia anak siapa, berasal dari mana, atau keturunan siapa.

Pemimpin harus mampu menghapus kendala budaya yang ada seperti paternalistik, feodalisme, dan “mental abdi dalem” dari setiap individu anak bangsa. Selain itu, harus mampu

pula menjadi sosok yang berani memberi tantangan dan resiko kepada penerusnya yang telah disiapkan melalui proses pengkaderan. Sebab, pemimpin yang berhasil, diibaratkan sebagai tempat menuntut ilmu yang dapat memberi tauladan dan pendidikan kepemimpinannya.

Mekanisme kaderisasi mampu menghasilkan kader berkualitas, hal ini dilakukan dengan cara membuka kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan seleksi di seluruh lapisan masyarakat dengan membangun budaya meritokrasi yang berimbang, sehingga tindakan ini membuat stok kepemimpinan nasional menjadi *over* suplai.

“Tentunya, kondisi ini akan membawa dinamisasi kepemimpinan. Dengan sendirinya kepemimpinan diserahkan kepada orang-orang muda berkualitas, masih *fresh* dan penuh semangat baru demi sebuah perubahan,” ujar Toety.

Visi dan misi yang ditawarkan oleh calon pimpinan nasional. Janji-janji perbaikan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, pertahanan, sampai budaya menjadikan harapan rakyat terhadap pimpinan nasional sangatlah besar, sebagaimana oase di tengah tandusnya sosok negarawan.

Namun, Suksesi Pimpinan Nasional 2014 juga dapat menjadi sebuah fatamorgana. Mengingat banyaknya persoalan yang tak kunjung terselesaikan selama beberapa periode, sehingga menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemimpin periode selanjutnya untuk segera dibenahi. Lantas, sanggupkah pimpinan nasional yang akan datang mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 ?

Kriteria Pemimpin Nasional Masa Depan

Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A.

Suksesi kepemimpinan nasional yang jatuh pada tahun 2014 ditandai dengan dua agenda besar nasional yakni, Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 9 April dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 9 Juli.

Pesta demokrasi lima tahunan tersebut diharapkan mampu mencetak pemimpin yang bertindak sebagai *problem solver* dalam memecahkan persoalan bangsa dan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebagai lembaga kajian strategis Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) memiliki pandangan terkait kriteria kepemimpinan nasional seperti diutarakan oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A.

Budi Susilo Soepandji mengharapkan agar pelaksanaan momen bersejarah yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut berjalan dengan baik dan mampu memunculkan sosok pemimpin yang dinantikan oleh rakyat serta mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

Selain itu, lanjutnya, kriteria lainnya dari pemimpin ideal adalah memiliki kapabilitas untuk menjadi pionir penggerak seluruh elemen bangsa agar bersatu padu memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa. Pemimpin masa depan juga harus mampu menentukan prioritas sasaran kepemimpinan dan strategi kepemimpinan yang tepat.

"Pada pilpres mendatang, kedua calon presiden sudah sama-sama teruji untuk menjadi pemimpin sesuai harapan rakyat. Saya berharap nantinya kepada yang menang jangan mengunggul-unggulkan diri, begitu juga kepada pihak yang kalah harus menerima kekalihannya secara legowo



agar stabilitas nasional terjaga sehingga pembangunan nasional dapat berlanjut.

Karena dalam pertandingan ada menang dan ada kalah. Semoga pelaksanaan Pilpres berjalan sukses, aman dan damai", ujar Budi Susilo Soepandji kepada Majalah Swantara pada Senin (16/6/2014) di ruang kerjanya.

Di samping itu, guna menghadapi tantangan ke depan di era globalisasi, dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki karakter, integritas, komitmen, konsistensi dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai amanah dan tetap memelihara nilai-nilai budaya yang telah melekat di dalam kehidupan bangsa dan negara, serta mampu menjalankan prinsip kepemimpinan sesuai dengan tuntutan dan harapan rakyatnya sebagai pemegang kedaulatan.

Lemhannas RI sendiri, sambung Budi Susilo Soepandji, telah melakukan berbagai upaya untuk mencetak pemimpin nasional yang berwawasan kebangsaan, khususnya bagi mereka yang berasal dari kader partai politik (parpol), antara lain melalui kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan dialog kebangsaan. Kegiatan ini ditujukan kepada kader dan pengurus parpol yang nantinya akan mewakili parpol untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan menjadi pemimpin nasional atau daerah setelah melalui tahapan seleksi yang ketat.

"Pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang diselenggarakan bagi pengurus dan kader parpol peserta Pemilu 2014 ini merupakan langkah penguatan karakter kebangsaan bagi pemimpin dan wakil rakyat yang diajukan oleh partai politik di tengah tantangan globalisasi. Program tersebut juga akan memberi pencerahan kepada mereka untuk dapat lebih memahami nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa", jelas Budi Susilo Soepandji.

Selain itu, program pemantapan nilai-nilai kebangsaan dilaksanakan untuk mengingatkan para kader parpol agar tidak terlena dengan euforia demokrasi yang dapat menjauhkan anak bangsa dari Pancasila sebagai buah pemikiran para pendiri bangsa dan identitas bangsa. "Sehingga dengan memahami komitmen sejarah dalam membangun kehidupan demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur", pungkas Budi Susilo Soepandji.

Memilih Pemimpin Tidak Bisa ‘Diperjudikan’

Berbagai visi dan misi ditawarkan oleh calon presiden. Janji perbaikan dalam bidang ekonomi, politik, hukum sampai budaya bergulir jelang masa pemilihan presiden 2014. Di sisi lain, masyarakat masih merasakan apatisisme yang tinggi, ini tak lepas dari kasus banyaknya pejabat pemerintahan yang terlibat dalam kasus suap dan korupsi, juga kaburnya pertanyaan ‘sosok seperti apa’ yang mampu memimpin Indonesia dalam menghadapi tantangan ke depan. Pemilihan Umum 2014, menjadi janji dan pengharapan sebagaimana oase di tengah tandusnya sosok kepemimpinan yang negarawan. Lalu, bagaimana seharusnya pimpinan nasional ke depan dalam membawa bangsa Indonesia? Terkait dengan hal tersebut, redaksi Swantara mewawancarai Prof. Dr. H. Muladi, S.H. Gubernur Lemhannas RI periode 2005 – 2011 di ruang kerjanya.

Seperti apakah seharusnya visi dan misi pimpinan nasional mendatang dalam menjaga stabilitas politik nasional?

Pada hakekatnya Stabilitas ha-kikatnya berkaitan dengan konsep dasar keamanan dalam rangka pencapaian tujuan nasional (*goal attainment*). Dalam arti luas, stabilitas politik nasional berarti keamanan yang meliputi dua level, yakni level nasional dan level internasional. Level nasional mencakup konsolidasi demokrasi, pembangunan ekonomi, perbaikan kesehatan dan penciptaan lingkungan yang sehat, serta rendahnya tingkat kejahatan, kekerasan, dan instabilitas politik, sementara di level internasional diharapkan terjaganya kedaulatan, integritas teritorial, persatuan nasional, independensi politik, dan pemajuan keamanan regional.

Di samping itu, terlaksananya proteksi terhadap *grey areas* yang berkaitan dengan “Operasi Militer Selain Perang (OMSP)” dimana stabilitas harus berorientasi pada kenyataan riil di masyarakat, maupun penilaian global terhadap Indonesia atas dasar berbagai *International Index* dari lembaga-lembaga internasional yang kredibel.

Langkah apa yang seharusnya ditempuh oleh pimpinan nasional



Prof. Dr. H. Muladi, S.H.

Gubernur Lemhannas RI Periode 2005-2011

untuk menumbuhkan kesadaran politik nasional berbasis Wawasan Nusantara?

Wawasan Nusantara bisa merupakan konsep abstrak maupun konsep fisik. Sebagai konsep abstrak, Wawasan Nusantara melihat konsep negara secara filosofis sebagai “organisme hidup” yang solid dan sebagai *learning organization* terintegrasi yang didukung oleh

pemahaman ideologis yang kuat yakni Pancasila, dan keyakinan-keyakinan terhadap kehidupan demokrasi konstitusional, NKRI, dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai yang dikatakan oleh Peter Senge, sebagai sebuah organisasi, negara harus berpegang teguh pada *system thinking*, *personal mastery*, landasan mental model kuat, *team learning and working*, serta memiliki *shared vision*. Secara fisik, Indonesia merupakan kesatuan geografi dan demografi yang unik, sebagai negara kepulauan tersebar di dunia yang ultrapluralistik yang sepakat untuk hidup bersama dan bersatu dalam kebhinnekaan.

Apa dan Bagaimana Strategi pimpinan nasional mendatang untuk meningkatkan pengaruh Indonesia di kancah perpolitikan kawasan Asia Pasifik?

Sebagai negara yang bebas aktif politik luar negerinya, wibawa Indonesia didasarkan atas kemampuan diplomasi di tingkat internasional, yang tentunya akan melahirkan wibawa eksternal. Meskipun kondisi dalam negeri baik, tapi tanpa wibawa di luar negeri, semuanya akan sia-sia. Wibawa eksternal nampak dari penghormatan regional dan internasional terhadap konsep Wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia,

dan geostrategi Indonesia yakni ketahanan nasional. Kedua konsep tersebut sebagai dasar negara berperan serta dalam penyelesaian konflik di Asia Pasifik seperti konflik Laut Tiongkok Selatan, imigran gelap, kejahatan transnasional terorganisasi, terorisme, demokratisasi di timur tengah, persoalan kudeta Thailand, serta mengembangkan konsep kerjasama keamanan (*cooperative security*).

Indonesia harus mantap dan tangguh dalam mengembangkan dan menyosialisasikan “sub-gatra” sosial berupa *National Character, National Unity, dan Civilization* yang berbasis *Science and Technology* serta *Human and National Capability*, serta diplomasi aktif baik *First Track* maupun *Second Track Diplomacy*.

Kriteria pemimpin seperti apa yang sebaiknya dipilih untuk Indonesia ke depan?

Indonesia telah mencapai berbagai prestasi, di antaranya merupakan anggota G-20, negara dengan 10 perekonomian terbesar di dunia, sebagai negara demokrasi ke-3 terbesar di dunia, *founding father* dari berdirinya ASEAN, pencapaian stabilitas ekonomi dan politik, serta sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar dan moderat.

Seorang pemimpin yang baik harus memiliki tiga karakter, pertama *State Character* yang terkandung dalam Empat Konsensus Nasional; kedua, *Governmental Character* yang mampu menciptakan dan mengembangkan demokratisasi di negaranya; dan *Individual Character* (*Rich Legacy of Memories and the Desire to Live Together*).

Untuk itu, nasib negara besar ini tidak bisa didasarkan pada konsep kualitas kepemimpinan yang bernuansa coba-coba atau *trial and error* atau diperjudikan.

Maksudnya ‘diperjudikan’?

Masyarakat tidak bisa memilih capres hanya dengan harapan ‘semoga baik’ tanpa melihat latar

belakang karir maupun prestasinya, serta memilih secara emosional. Pemimpin yang baik adalah yang memiliki karakter yang terukur dalam Indeks Kepemimpinan, yakni mencakup karakter manager, leader, negarawan (*statesman*), dan *Indonesian Geoleadership*.

Dengan penghayatan terhadap empat kelompok karakter tersebut di era globalisasi multidimensi saat ini, seorang pemimpin bangsa besar akan selalu dinilai sampai seberapa jauh pemimpin tersebut sukses menerapkan konsep bahwa kesejahteraan dan keamanan nasional merupakan sub sistem kesejahteraan dan keamanan regional dan internasional, sehingga dihormati, tidak hanya dalam negeri tetapi luar negeri.

Upaya apa yang dapat ditempuh oleh pimpinan nasional mendatang dalam menyikapi menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah?

Pemimpin harus memberikan suri teladan yang meyakini bahwa “trust” merupakan legitimasi seorang pemimpin yang tertinggi. Ketidakpercayaan akibat terjadinya pe-

nyimpangan yang dilakukan seorang pemimpin bersumber pada tingginya Monopoli Kekuasaan dan Kewenangan Diskersi, dan rendahnya Akuntabilitas, Moralitas, Transparansi serta Integritas. Hal tersebut mencakup nilai-nilai individual, sosial, kelembagaan, dan global.

Apa tanggapan Bapak soal “politik bagi-bagi kue” yang saat ini kerap dilakukan oleh para politikus?

“Politik bagi-bagi kue” merupakan sesuatu yang normal dalam transaksi politik, asal tujuannya positif dalam rangka pencapaian cita-cita, tujuan dan kepentingan nasional. Meskipun demikian, kegiatan politik tetap harus didasarkan atas prinsip atau parameter profesionalisme dan “*knowledge based development*” yang bersifat empiris mencakup nilai-nilai “*expertise, social responsibility and corporateness*”, tanpa mengorbankan kepentingan bangsa dan negara.

Apa tanggapan Bapak atas konflik dan kisruh yang kini terjadi di lingkungan partai politik?

Dari sisi demokrasi dan promosi





politik.kompasiana.com

serta perlindungan HAM, perbedaan atau konflik internal partai dalam mengusung capres/cawapres wajar. Akan tetapi, hal tersebut secara kolektif mendemonstrasikan bahwa partai politik belum menjalankan tujuan dan fungsinya secara baik, sehingga pimpinan parpol yang seharusnya sebagai “*central figure*” yang ditaati kebijakannya, menjadi kontradiktif dan bias. Anggota partai masih belum memahami tujuan dan fungsi partai politik yang harus dihayati secara kolektif, yakni : tujuan umum partai mewujudkan cita-cita nasional, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia; tujuan khusus meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat; memperjuangkan cita-cita partai politik;

membangun etika dan budaya politik; serta fungsi partai: pendidikan politik agar anggota dan masyarakat sadar atas hak dan kewajibannya, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerapan, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik masyarakat, dan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan publik secara demokratis.

Bagaimana tanggapan Bapak mengenai penanganan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilu legislatif 9 April 2014 kemarin? Lalu bagaimana dengan aturan dan penegakkan hukum dalam aturan pemilu yang ada, apakah masih ada celah pelanggaran?

Untuk mengatasi berbagai

pelanggaran proses pemilu yang lalu agar tidak terjadi lagi di masa depan, khususnya kecurangan dan “*money politics*” yang beritanya sangat masif, terstruktur, tersistematis, serta brutal, di samping diperlukannya penegakkan hukum yang tegas dan pasti, adil dan proporsional, diperlukan pendidikan politik bahwa pemilu yang jujur dan adil (*free and fair election*), merupakan salah satu nilai dasar peradaban dan demokrasi, tidak boleh dipisahkan dengan nilai-nilai dasar demokrasi lain, yaitu : prinsip kontitusionalisme, prinsip *checks and balances*, asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*), supremasi hukum, sistem desentralisasi, promosi dan perlindungan HAM, *civil society* (masyarakat madani), Polri, serta TNI yang netral.

H. Sidarto Danusubroto

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Dibutuhkan Seorang Pemimpin yang Berani Melakukan Revolusi Mental Sesuai Pancasila

Menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto, proses demokrasi yang selama ini dijalankan oleh para penyelenggara negara, kurang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Tentu saja hal ini kemudian berimbas pada proses penyelenggaraan negara dan dampak yang tercermin pada perilaku masyarakat terhadap penyelenggara negara.

“Oleh karenanya, perombakan sistem (institusional) harus diikuti dengan perombakan mentalitas mereka yang diberikan otoritas kepadanya untuk menjalankan sistem tersebut,” ujar Sidarto kepada *Majalah Swantara*.

“Salah satu inti permasalahan adalah perombakan sistem kelembagaan negara yang bersifat institusional belaka, terbukti kurang memadai ketika masih dijalankan oleh para penyelenggara negara yang berintegritas lemah. Itulah mengapa perombakan sistem kelembagaan, yang terjadi melalui pelaksanaan amandemen UUD 1945, dalam perjalanannya dengan sejumlah indikator yang ada, terlihat seakan-akan tidak memberikan manfaat apapun.

Lebih lanjut Sidarto mengatakan, sebenarnya, cara berpikir dikotomis yang menghadap-hadapkan mana yang lebih signifikan dan substantif antara perbaikan sistem dan individu, tidak relevan lagi untuk dipersoalkan dewasa ini.

“Karena, sistem sendiri adalah produk yang dihasilkan melalui kristalisasi nilai-nilai yang telah disepakati bersama, yang konsekuensinya mengikat semua aspek, negara, penyelenggara negara, dan warga negara. Sistem sendiri adalah



seperangkat nilai yang diimplementasikan ke dalam format dalam kerangka untuk memudahkan dan menjadi acuan komunitas (negara-bangsa) melaksanakan tujuan bersama sekaligus pula merupakan alat ketertiban bersama,” ungkap Sidarto.

“Hal ini kemudian terlihat dari kualitas penyelenggaraan pemilihan legislatif pada 9 April lalu yang terindikasi begitu masifnya praktik politik uang, yang membuat kita prihatin. Banyak kalangan berpendapat bahwa Pileg 2014 adalah Pileg terburuk yang pernah ada dalam sejarah demokrasi Indonesia. Kita tahu bahwa amandemen konstitusi adalah bagian dari upaya untuk melakukan perombakan sistem. Akan tetapi, ketika hasil perombakan sistem itu dipraktikkan, ternyata capaiannya tidak sesuai harapan. Satu-satunya penyebab adalah belum terjadi perombakan mental manusia-manusia yang tidak memiliki integritas yang notabene di tangan merekalah kekuasaan negara diselenggarakan,” ujar Sidarto.

Akibat hal tersebut, maka perubahan khususnya peningkatan kesejahteraan yang dipercayakan rakyat kepada rejim terpilih, tidak memenuhi harapan,” jelas Sidarto.

Sidarto melanjutkan bahwa, kondisi yang terjadi saat ini adalah

sesuatu yang sulit untuk ditepis, sehingga gagasan revolusi mental yang penekanannya ditujukan kepada para penyelenggara negara, dapat menjadi sebuah alternatif dalam upaya mengatasi sistem yang tidak berjalan dengan baik atau macet dan menghambat pencapaian tujuan.

Hal ini perlu ditempuh, mengingat kondisi tersebut selalu berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan rakyat yang tidak akan pernah tercipta. “Penyebabnya sudah dipastikan yakni para penyelenggara negara sama sekali tidak menjalankan amanat sila kedua Pancasila untuk membangun kemanusiaan kita yang menerapkan relasi-relasi yang berkeadilan dan berkeadaban,” cetus Sidarto.

Oleh karena itu dalam hubungan antara negara-penyelenggara negara, juga negara-warga negara, sesama warga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti misalnya dalam praktik politik atau keagamaan yang berimplikasi sosial, apa yang dimaksud dengan realisasi kemanusiaan selalu berhubungan dengan penerapan keadilan dan keberadaban.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sendiri kata Sidarto bersifat definitif. Konotasinya adalah satu-satunya tolok ukur untuk menilai sejauh mana elemen-elemen terkait, yaitu negara, penyelenggara negara, dan warga negara secara bersungguhsungguh menginginkan dengan berbagai konsekuensi agar keadilan dan keberadaban itu tegak, tanpa kecuali.

“Pengertian tersebut dalam bahasa hukum dikenal sebagai kesetaraan di hadapan hukum. Sebab, keadilan yang merupakan tujuan penegakan hukum tidak boleh berpihak (imparsial) menista kesetaraan,” jelas Sidarto.

Harus Ada Terobosan Untuk Mengatasi Keterbatasan Anggaran Pertahanan

Pimpin nasional mendatang diharapkan mempunyai visi dan misi untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara di kawasan Asia Pasifik dengan kekuatan pertahanan yang tangguh. Guna mewujudkan hal tersebut, konsep yang dikembangkan sebaiknya tidak mengacu kepada cara berpikir ekonomis semata. Pertahanan jangan dipandang sebagai sektor konsumtif yang tidak produktif, tetapi harus melihat kepada implikasi yang ditimbulkan. Demikian dikatakan oleh pengamat pertahanan, Edy Prasetyono kepada Swantara.

"Pertahanan itu sesuatu yang konsumtif. Iya, karena kita harus menghabiskan biaya besar untuk membeli berbagai kebutuhan per-

tahanan. Bisa menghabiskan 70-80 triliun rupiah. Tapi cara melihatnya jangan seperti itu, kepentingan apa yang bisa dilindungi dari situ, besar sekali," tutur Edy.

Kebutuhan untuk membangun kekuatan pertahanan yang tangguh dasarnya adalah ancaman. Dengan wilayah yang begitu luas, Indonesia harus mampu mengamankan seluruh wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Serta mengawasi seluruh kegiatan di wilayah kedaulatan, guna mencegah terjadinya pencurian sumber kekayaan alam.

"Sekarang kita kehilangan pemasukan akibat pencurian ikan bisa 4-5 milyar dolar setiap tahunnya. Penyelundupan barang karena ketidakmampuan kita mengawasi wilayah itu sekitar 4 milyar dolar juga," ujar Edy.



Dr. Edy Prasetyono

Pengamat Pertahanan UI

Namun demikian, Edy tidak menampik adanya keterbatasan anggaran pertahanan. Perlu adanya terobosan-terobosan agar pembangunan kekuatan pertahanan dapat terus berjalan.



Beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan ini menurutnya adalah membuat prioritas pertahanan, yaitu dengan menentukan titik-titik yang rawan.

Pada titik-titik tersebut kekuatan pertahanan dapat ditingkatkan. Yakni di wilayah yang menghadap ke Laut Andaman, lalu wilayah yang menghadap Selat Malaka. Berikutnya adalah Kepulauan Natuna, sebagai wilayah penting karena berhadapan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan. Kemudian wilayah Kalimantan Timur, yang menghadap Malaysia. Wilayah Papua bagian utara, misalnya Biak. Untuk wilayah selatan, adalah daerah yang berhadapan dengan Australia, dan yang menghadap ke pulau Christmas, dan pulau Cocos.

Selanjutnya adalah desentralisasi beban pertahanan. Konsepnya, dengan tidak membebaskan semua sektor pertahanan kepada Kementerian Pertahanan saja. Beban tersebut harus disebar ke beberapa kementerian lain. Dalam hal ini, perlu adanya kerja sama antar kementerian. Dengan demikian, anggaran dapat di-

maksimalikan untuk pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Hampir 60-70% dari anggaran pertahanan itu untuk rutin, seharusnya bisa disebar ke beberapa kementerian. Misalnya pendidikan prajurit yang berkaitan dengan pengembangan, seperti sekolah ke luar negeri, itu kan bisa dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi tidak semua dibebankan kepada Kementerian Pertahanan, berarti akan lebih besar porsi untuk penambahan kekuatan dan sebagainya," imbu Edy.

Langkah berikutnya untuk membangun kekuatan pertahanan yang tangguh adalah memprioritaskan pengadaan jenis senjata tertentu. Senjata tersebut haruslah memenuhi tiga syarat sekaligus, yakni memiliki kecanggihan teknologi, mempunyai daya penghentak terhadap negara lain, dan terakhir adalah harga yang terjangkau. Menurut tenaga pengajar Universitas Indonesia ini, senjata yang dapat memenuhi tiga syarat tersebut adalah rudal.

"Karena di dalam prinsip pengembangan kekuatan pertahanan itu ada faktor pengganti. Misalnya kalo saya harus beli jenis senjata ini sangat mahal saya harus bisa gantikan dengan jenis lain, mungkin harga bersaing tapi efektifitasnya tinggi," pungkas Edy.

Langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh Edy tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pimpinan nasional mendatang dalam merumuskan visi dan misi di sektor pertahanan. Pembangunan kekuatan pertahanan menjadi hal penting dan tidak bisa ditunda lagi, mengingat waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan kekuatan pertahanan Indonesia yang tangguh tidaklah sebentar.

"Perubahan dari situasi yang sangat baik, menjadi baik, cukup baik, kemudian kurang baik, sangat buruk, kemudian perang, itu bisa dalam hitungan hari. Tetapi membangun kekuatan pertahanan butuh waktu puluhan tahun. Artinya harus selalu siap," jelas Edy.

Pemerintahan Baru Harus Membawa Perubahan Sesuai Harapan Rakyat



Enny Sri Hartati

Ekonom INDEF

Suksesi pimpinan nasional yang bergulir pada 9 Juli yang melalui mekanisme Pemilihan Presiden (Pilpres) tentunya dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Dengan demikian, Pilpres 2014 diharapkan mampu membawa harapan baru, dan menumbuhkan sikap optimisme tersendiri bagi rakyat. Karena melalui tahapan ini, nantinya akan terlahir pemimpin baru yang mampu membawa perubahan sesuai harapan rakyat dalam mewujudkan cita-cita

kemerdekaan, yaitu membawa kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera. Sementara, harapan publik terhadap pimpinan nasional yang baru sangat besar, mengingat warisan persoalan yang ditinggalkan pemimpin sebelumnya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemimpin periode selanjutnya untuk segera dibenahi.

Direktur *Institute for Development of Economic and Finance (INDEF)* Enny Sri Hartati mengatakan *INDEF* sendiri telah mencatat 10 indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk

mengukur kinerja pemerintahan di bidang perekonomian, yakni pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi rapuh dan tidak berkualitas. Kedua, tingkat pengangguran terbuka yang menurun secara lambat.

“Ketiga, tingkat kemiskinan berjalan di tempat. Keempat, adanya ketimpangan semakin melebar,” ujar Enny kepada Majalah Swantara.

Sedangkan yang kelima, tambah Enny, perekonomian sendiri juga dihadapkan dengan tekanan inflasi. Keenam, nilai tukar petani (NTP) tidak kunjung meningkat. Ketujuh, sektor formal meningkat, namun porsi sektor informal masih terlalu besar.

“Kedelapan, *tax ratio stagnan*. Kesembilan, belanja rutin dan subsidi semakin tidak terkendali. Sepuluh, terbelit defisit neraca Perdagangan,” ungkap Enny.

Enny menerangkan, pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam persen dapat dikatakan sebagai pertumbuhan yang tidak berkualitas, karena ekonomi Indonesia rata-rata hanya mampu tumbuh sekitar 5,8% per tahun.

“Sayangnya, capaian pertumbuhan ini diikuti dengan semakin terpinggirkannya sektor *tradable*, dan makin lebarnya ketimpangan,” jelas Enny.

Lebih lanjut Enny mengatakan begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka dalam persen (%), tingkat pengangguran terbuka dapat diturunkan, namun penurunannya sangat lambat akibat sumber pertumbuhan ekonomi hanya bertumpu pada sektor *non tradable* yang kedap terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan lanjut Enny, tingkat kemiskinan dalam persen juga menurun dengan lambat.

“Peningkatan anggaran kemiskinan tidak cukup signifikan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satu penyebabnya karena program pengentasan kemiskinan terlepas dan tidak terintegrasi dengan pembangunan

pedesaan, pertanian serta pemberdayaan UMKM,” kata Enny.

Enny juga menjelaskan, untuk *gini ratio* dalam persen (%), ketimpangan antara penduduk yang kaya dan miskin semakin melebar.

“Peningkatan ketimpangan membuat capaian pertumbuhan ekonomi tidak dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Sedangkan tingkat *inflasi* dalam persen *tren*-nya menurun. Namun sumber *inflasi* masih didominasi dari pangan sehingga sangat menekan daya beli masyarakat bawah. Fluktuasi harga pangan disebabkan karena ketergantungan impor komoditas pangan *strategis*,” tambah Enny.

Sementara itu sambung Enny, nilai tukar petani dalam persen (%) juga tidak kunjung meningkat.

“Akibatnya, kesejahteraan petani semakin tidak terpenuhi. Penyebab utamanya adalah disparitas harga yang tajam antara harga di level petani dengan harga di level konsumen pada komoditas pertanian. Petani menerima harga dibawah harga keekonomiannya,” ungkap Enny.

Sektor Formal dalam persen (%) meningkat, tetapi porsi sektor informal masih terlalu besar (lebih dari 58%).

“Melambatnya pertumbuhan sektor formal mengindikasikan bahwa iklim usaha yang masih belum kondusif. Padahal sektor informal sangat rentan terhadap gejolak ekonomi,” jelas dia.

Selain itu, banyak kesempatan yang dimiliki pemerintah menjadi terlewatkan. “Padahal Indonesia memiliki potensi besar yang seharusnya dapat dimaksimalkan, seperti ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Serta tantangan yang mesti dihadapi yakni ketimpangan ekonomi, ketiadaan kebijakan Pro UMKM, lambatnya pembangunan infrastruktur, juga perbandingan investasi *Rill* dan *Portfolio*,” kata Enny berharap.

“Juga terjadinya Ketimpangan Ekonomi yang ditandai dengan ter-

jadi ketimpangan antara sektor *tradable* dan *non tradable*, sumber pertumbuhan ekonomi didominasi oleh *sector non tradable*. Sektor industri mengalami penurunan pertumbuhan yang drastis. Hal ini disebabkan dengan ketiadaan kebijakan dan strategi pembangunan industri di Indonesia. Industri yang berkembang adalah industri yang mempunyai daya saing rendah karena ketergantungan bahan baku, barang modal dan teknologi impor. Selain itu, pembangunan industri gagal membangun industri hilir yang berbasis pertanian dan pertambangan yang memiliki daya saing dan nilai tambah besar,” ujar Enny.

Oleh karenanya Enny menyarankan kepada Pemerintah yang baru agar menyusun strategi dan kebijakan lima tahun mendatang.

“Pemerintah selama ini telah kehilangan potensi faktor penyebabnya karena, pertama, strategi yang disusun tidak fokus dan tanpa arah atau haluan. Kedua, kebijakan tanpa perencanaan yang komprehensif hanya reaktif dan parsial dan terakhir orientasi kebijakan hanya jangka pendek dan bersifat populis,” ungkap Enny.

Padahal, potensi yang dimiliki oleh Indonesia sangat besar, namun untuk dapat merealisasikan target tersebut diperlukan langkah, yakni konsistensi kebijakan, komitmen dan sinergisitas antar sektor atau lembaga serta pusat dan daerah,” imbuh Enny.

Sementara itu, pemerintah baru akan dibebani target lima tahun kedepan terutamanya 10 kegagalan kinerja yang kritis dan fatal.

“Untuk mencapai target kinerja perekonomian dibutuhkan intervensi kebijakan yang tepat,” ujar Enny.

Jika pemerintah tidak melakukan strategi dan kebijakan yang *fundamental* maka Indonesia akan berkuat pada persoalan yang sama dan akan terjebak pada *middle income trap*.

Menuju Sistem Pendidikan yang Mencerdaskan Kehidupan Bangsa



Prof. Dr. Har Tilaar
Pakar Pendidikan

Pakar Pendidikan Prof. Dr. Har Tilaar mengatakan bahwa pendidikan adalah faktor terpenting bagi kemajuan suatu bangsa. "Bangsa yang maju salah satunya dapat dilihat dari pendidikannya," ujar Har Tilaar kepada Majalah Swantara.

Lebih lanjut Har Tilaar menjelaskan tujuan pendidikan nasional itu sendiri sebagaimana tertuang di dalam UUD

1945 pada pasal 31 ayat 3, yang menyatakan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa."

Selain itu, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 disebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

"Dengan konsep tujuan pendidikan nasional, diharapkan peserta didik memiliki keimanan yang tinggi, mempunyai watak dan karakter yang bermartabat, manusia yang beriman,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis serta bertanggung jawab, dan yang tak kalah pentingnya, dapat bersaing di pentas dunia internasional," jelas Har Tilaar.

Menurut data hasil riset yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM memperlihatkan, hanya sekitar 6,12% lulusan sarjana yang berminat menjadi wirausahawan, selebihnya 83,18% berminat menjadi pegawai. Hal ini menunjukkan lulusan perguruan tinggi Indonesia belum mampu melahirkan alumnus yang kreatif dan berjiwa mandiri. Dalam penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan, justru tidak serta merta meningkatkan jiwa kreatifitas atau semangat kemandirian. Minat lulusan SLTA untuk menciptakan lapangan kerja baru justru lebih besar, sekitar 20%. "Tentu saja hal tersebut sangat mengkhawatirkan," ujar Har Tilaar.



Sebagai seorang yang lama berkecimpung di dunia pendidikan, tentu saja fakta dan data soal pendidikan membuatnya merasa prihatin. Oleh karenanya, menjelang suksesi pimpinan nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang dirinya berharap kepada pemimpin terpilih, agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di tanah air melalui Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Melalui Sisdiknas, harus dilaksanakan penanaman serta penghayatan dan pengembangan sikap serta nilai-nilai kebangsaan di dalam proses belajar atau kurikulum pendidikan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi,” harap Har Tilaar.

Sistem serta proses pendidikan yang demikian, kata Har Tilaar, disebut sebagai pendidikan humanis. “Pendidikan humanis mencakup dua aspek yaitu aspek obyektif dan aspek subyektif. Aspek obyektif dari pendidikan humanis terutama merupakan tanggung jawab pemerintah dengan semua aparatnya serta oleh masyarakat luas. Nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang merupakan nilai-nilai Pancasila, adalah sumber dari berbagai kebijakan pemerintah di semua sektor pembangunan. Nilai-nilai obyektif

yang bersumber dari Pancasila tersebut, juga merupakan pegangan dari media massa seperti media cetak, TV, Radio yang menyebarkan nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya,” urai Har Tilaar.

Sedangkan pada aspek subyektif, pendidikan humanis tersebut dapat berupa kurikulum utama, yang berisi antara lain Bahasa Indonesia, Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Geografi Indonesia, dan peningkatan nilai-nilai toleransi di dalam kehidupan lingkungan pendidikan.

“Nilai-nilai kesatuan tersebut hendaknya bukan hanya diketahui, dihafal, dan diujikan dalam Ujian Nasional. Tetapi yang lebih penting adalah dihayati, diketahui, dan dikembangkan di dalam budaya sekolah dan kehidupan sehari-hari dari peserta didik,” imbuh Har Tilaar. Hal tersebut merupakan nilai-nilai humanis dalam rangka mengembangkan nilai-nilai kebersamaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pendidikan humanis bukan pendidikan yang mementingkan daya pikir, tetapi yang tidak kurang pentingnya adalah menekankan

kepada kehidupan bersama dalam mewujudkan nilai-nilai nasional atau identitas bangsa Indonesia,” jelas Har Tilaar.

Mengutip perkataan Syafii Maarif, Har Tilaar mengatakan bahwa pengenalan dan penghayatan serta perwujudan nilai-nilai kebhinnekaan bangsa Indonesia belum sepenuhnya terwujud, bahkan mulai meredup.

“Apa yang ditekankan di dalam kehidupan bersama Bangsa Indonesia selama ini, bukannya nilai-nilai persatuan, tetapi lebih menekankan kepada nilai-nilai perbedaan,” jelas Har Tilaar.

Dikhawatirkan, meredupnya pengembangan dan penghayatan serta perwujudan nilai-nilai kebhinnekaan tersebut, dapat meruntuhkan kesatuan Bangsa Indonesia, menguburkan Pancasila, dan berakhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pembangunan kebudayaan Indonesia melalui pendidikan humanis merupakan upaya perwujudan trisakti perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam rangka merealisasikan proklamasi kebudayaan Indonesia sebagai wujud Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,” tandas Har Tilaar.

Kepemimpinan yang Kuat dan Berbudaya

Penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pipres) pada 9 Juli tahun ini tak bisa dilepaskan dari budaya bangsa yang juga merupakan bagian dari identitas bangsa. Kebanggaan terhadap identitas bangsa yang diiringi dengan memuncaknya rasa nasionalisme yang tinggi dengan sendirinya membawa bangsa itu maju dalam persaingan dunia internasional dewasa ini, seperti yang telah dicontohkan oleh Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Guru Besar Filsafat UI, Toety Heraty mengutip perkataan Amartya Sen yang mengatakan pentingnya budaya di dalam membangun dunia masa depan yang lebih makmur dan aman dalam suatu pembangunan yang berkelanjutan.

Kebudayaan sendiri adalah sarana yang esensial di dalam pembangunan berkelanjutan, oleh karena kebudayaan menjamin kebersamaan, toleransi, kerjasama, dalam membangun suatu masyarakat yang lebih makmur, bahagia,



Prof. Dr. Toety Heraty

Guru Besar Filsafat UI

dan merata,” kata Toety kepada Majalah Swantara.

Lebih lanjut Toety menuturkan bahwa pembangunan kebudayaan

sendiri dimulai melalui pembangunan pribadi kepada generasi muda yang terarah dan ditujukan kepada pembangunan kebudayaannya yang dimulai dari budaya lokal, nasional, serta meningkat pada regional dan internasional. Kebudayaan juga merupakan suatu kekuatan di dalam masyarakat untuk bersatu. "Kebudayaan menurut Weltanschauung adalah pandangan hidup dari suatu masyarakat," jelas Toety.

Jika kemudian kebudayaan dihubungkan dengan suksesi pimpinan nasional, dimana panggung suksesi pimpinan nasional kini ditandai dengan isu untuk memunculkan kepemimpinan yang kuat dan berbudaya, dengan kemampuan dalam membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemimpin tersebut harus memiliki keunggulan moral, kepribadian, serta didukung dengan kemampuan intelektual. "Kini saatnya kepemimpinan nasional diserahkan kepada sosok yang memiliki integritas, bersih, peduli, profesional, dan berbudaya demi cita-cita luhur bangsa ini," ujar Toety.

Toety juga mengingatkan agar jangan pada saat pilpres, menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini kepada pemimpin yang

memiliki rekam jejak yang tidak jelas, ditambah lagi tidak memiliki kepribadian dan tidak konsisten dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dan mengesampingkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang.

"Oleh karenanya, bangsa ini, juga perlu menata ulang sistem dalam menunjuk para pemimpinnya. Diperlukan meritokrasi kepemimpinan. Kini sebagai bangsa yang besar, memiliki budaya sebagai identitas, Indonesia harus membuka kesempatan untuk dapat memunculkan regenerasi pemimpin baru, tidak lagi bertumpu pada level struktural lembaga pemerintahan, tetapi juga mengikutsertakan setiap segmen sektor kehidupan masyarakat," jelas Toety.

Lebih lanjut Toety mengatakan kini peralihan kepemimpinan nasional bukan lagi diserahkan kepada segelintir elite atau menjadi monopoli elit. Selain itu, pemimpin Indonesia masa depan adalah sosok yang dapat memberi kesempatan dan peluang bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam pentas nasional.

"Pemimpin itu, mampu menghapus kendala budaya yang ada, seperti paternalistik, feodalisme, dan "mental abdi dalem" dari setiap individu anak bangsa. Selain itu

dirinya juga mampu menjadi sosok yang berani memberi tantangan dan resiko kepada penerusnya yang telah disiapkan melalui proses seleksi pengkaderan. Sebab, pemimpin yang berhasil, diibaratkan sebagai tempat menuntut ilmu yang dapat memberi tauladan dan pendidikan kepemimpinan," imbuh Toety.

Toety menambahkan mekanisme kaderisasinya, mampu menghasilkan kader berkualitas, hal ini dilakukan dengan cara membuka kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan seleksi di seluruh lapisan masyarakat dengan membangun budaya meritokrasi yang berimbang, sehingga tindakan ini membuat stok kepemimpinan nasional menjadi *oversuplai*.

"Tentunya, kondisi ini akan membawa dinamisasi kepemimpinan. Dengan sendirinya kepemimpinan diserahkan kepada orang-orang muda berkualitas, masih *fresh* dan penuh semangat baru demi sebuah perubahan," ujarnya.

Seleksi kepemimpinan kata Toety harus bertumpu pada prestasi, apa yang sudah mereka lakukan melalui rekam jejaknya saat dirinya memimpin. "Bukan karena dia anak siapa, berasal dari mana, keturunan siapa. Dengan begitu kepemimpinan akan bergaya egaliter," tandas Toety.



Suksesi Kepemimpinan Nasional Secara Demokratis

Suksesi kepemimpinan nasional yang digulirkan lima tahunan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan dan pelaksanaannya sendiri dilakukan melalui mekanisme Pemilihan Presiden (Pilpres). Pemimpin yang terpilih nantinya mampu menjadi sosok pemimpin yang berintegritas, kredible dan senantiasa berpihak kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mewujudkan cita-cita dan semangat Proklamasi Kemerdekaan.

Menurut Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Dr. Siti Zuhro mengatakan Pilpres yang digelar secara langsung untuk memilih calon presiden dan wakil presiden bukan sekadar sebagai pembeda antara sistem demokrasi dan sistem otoriter. Tetapi sarana demokratis ini digunakan sebagai alat terjadinya suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis.

"Pemilu dan Pilpres diselenggarakan untuk mencari pemimpin yang berintegritas, kredibel, kapabel, akseptabel, akuntabel, sehingga mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan bangsa demi mencapai tujuan negara, yakni memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya," jelas Siti kepada Majalah Swantara.

Sejatinya, seorang pemimpin harus menjadi *problem solver* dalam menyelesaikan segala permasalahan yang membelit negaranya. Padahal, kriteria dasar seorang pemimpin selain sebagai *problem solver*, mereka juga harus memiliki visi dan pandangan jauh ke depan, dapat mengarahkan dan memobilisasi rakyat dalam mencapai tujuan, punya kecerdasan emosional, dan dapat berempati.

"Kompleksitas masalah yang tengah dihadapi Indonesia saat ini, mensyaratkan pemimpin harus mampu mengelola "ke-Indonesiaan" dan

"kedaerahan" yang dilakukan secara berimbang dan efektif, sehingga menghasilkan energi yang positif untuk mendorong akselerasi pembangunan di Indonesia yang belakangan ini tampak menghadapi banyak kendala," ujar Siti.

Selain itu, pemimpin juga harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan rakyatnya, maupun dalam pergaulan internasional, memahami dinamika daerah serta visi internasional dan memiliki rekam jejak kepemimpinannya yang jelas, memiliki integritas moral, kejujuran publik, adil, tak pernah tersangkut KKN atau kasus asusila, dan dapat diterima atau dapat dukungan dari publik sendiri.

"Di negara yang sudah maju, pergantian atau suksesi kepemimpinan berlangsung dari bawah (*bottom up*). Seperti yang terjadi di Amerika Serikat (AS), siapapun yang muncul sebagai calon presiden (*capres*) di pilpres, pernah menjabat sebagai senator. Sehingga seleksi pimpinan nasional dengan sendirinya berjalan sangat natural, karena seorang politikus menata karir politiknya sendiri dimulai dari bawah hingga mencapai jenjang puncak karier tertinggi di dunia politik. Dengan sendirinya masyarakat dapat mengetahui rekam jejak calon pemimpinnya, karena *track record* yang dimiliki sangat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh publik sendiri," ujar Siti.

Sementara dalam konteks di negara Indonesia, ujar Siti, ikon "Membangun Indonesia dari Daerah" dapat dijadikan sesuatu yang baru, pasca runtuhnya rezim Orba. Sejak tahun 2001, Indonesia sendiri sudah menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi berbasis otonomi daerah.

"Idealnya para pemimpin yang dianggap telah berhasil memimpin daerahnya, baik di tingkat kabupaten/kota, mendapat kesempatan untuk berkompetisi di pilkada provinsi.



Prof. Dr. Siti Zuhro
Peneliti Senior Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia

Demikian juga, gubernur-gubernur yang berhasil membawa provinsinya maju, mendapat peluang bertarung di pilpres. *Achievement* kepemimpinan seperti itu akan mendorong pimpinan-pimpinan daerah berupaya untuk memaksimalkan kinerjanya, sekaligus cara ini menjadi iming-iming bagi kepala daerah untuk terus menunjukkan kinerja terbaik bagi daerahnya," imbuh Siti.

Dengan sistem baru seperti ini, para pemimpin daerah tingkat II maupun pemimpin daerah tingkat I berprestasi yang berhasil dalam memimpin daerah tidak cukup hanya sekedar diberikan penghargaan berupa "Autonomy Award" atau penghargaan serupa semata. "Tetapi kini sudah saatnya mereka yang berhasil ini didorong untuk menyiapkan diri memimpin negeri. Sehingga hal ini akan memunculkan sirkulasi elite nasional dan mampu memunculkan pluralisme calon pemimpin di Indonesia. Era demokrasi harus mampu menghadirkan budaya baru, yaitu cairnya sirkulasi elite nasional dan pemberian peluang bagi pemimpin daerah untuk muncul di panggung nasional," tandas Siti.

Tantangan Pemimpin Nasional dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia



Prof. Dr. Maizar Rahman

Professor Riset, Acting Sekjen OPEC (2004),
Gubernur OPEC (2005-2008)

Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam, baik energi, mineral, hutan, laut dan sumber daya hayati”, demikian kalimat yang sering kita dengar. Para pendiri negara ini memahami benar bahwa sumber daya alam adalah modal awal untuk kemakmuran bangsa, namun harus tetap terpelihara. Pidato Bung Hatta Pada Kongres ISEI, 15 Juni 1979 (pidato beliau yang terakhir) memberikan arahan yang jelas tentang cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 dan bagaimana seharusnya bangsa ini mengelola sumber daya alamnya untuk kemakmuran.

Menurut beliau, bilamana kita belum memiliki kemampuan teknologi, manajemen dan modal, maka kita boleh mengundang pihak asing untuk mengelola kekayaan alam kita, tentu dibawah pengaturan, pengendalian

dan pengawasan oleh Pemerintah, dan itu berakhir setelah kita memiliki kemampuan sendiri. Jadi artinya, bahwa peran asing bukan tidak punya batas, tapi secara bertahap dikurangi setelah kita mulai mampu menangani pengelolaan sumber daya alam ini dengan mendidik putra-putra bangsa dan mewajibkan perusahaan asing untuk mendidik mereka dalam bekerja dan manajemen. Di samping itu kita harus melakukan penelitian dan pengembangan teknologi agar tidak tergantung pada teknologi asing. Di bidang permodalan, kita harus mampu menabung sebagian penerimaan negara dari sumber daya alam tersebut, apakah dari minyak, gas, mineral, kehutanan, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya, sehingga pengembangan dan pelestarian sumber daya alam selanjutnya dapat dilakukan dengan kekuatan modal sendiri.

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa arahan Bung Hatta tersebut tidaklah berjalan sepenuhnya. Sampai saat ini, setelah hampir 70 tahun merdeka, apa yang dicita-citakan jauh dari kenyataan. Indonesia masih harus mengandalkan pihak asing untuk membawa teknologi, permodalan dan manajemen. Sudah milyaran barel minyak dan gas harus diserahkan ke pihak asing sebagai bagi hasil. Di bidang tambang mineral kita hanya mendapatkan royalti yang rendah, mineralnya diekspor berupa bahan mentah sehingga kita kehilangan peluang nilai tambah dan lapangan

kerja, yang malahan dinikmati negara yang mengimpor. Pengelolaan tambang-tambang tersebut juga banyak yang tidak terkendali sehingga berbagai lahan ditinggal rusak tanpa reklamasi, yang tentu merupakan warisan buruk bagi generasi mendatang. Di bidang kehutanan, hutan dibabat tanpa kendali meninggalkan lahan kritis seluas 30 juta hektar lebih. Di bidang kelautan, nelayan kita masih memakai cara tradisional yang produktivitasnya sangat rendah, dan pihak asing pun berdatangan mencuri kekayaan kelautan kita.

Cadangan minyak terbukti Indonesia tersisa 3,7 milyar barel, merosot terus dari tahun ke tahun, sekarang hanya cukup untuk 12 tahun ke depan. Demikian juga tingkat produksi terus turun menjadi hanya 850 ribu barel per hari, separonya dibanding tahun 90-an. Di samping itu hasil minyak tersebut harus dibagi untuk biaya produksi dan bagi hasil dengan kontraktor asing sehingga tinggal sekitar 550 ribu barel per hari. Badan usaha milik negara dan pengusaha nasional hanya menghasilkan 30 % produksi migas, selebihnya asing. Di lain pihak, konsumsi domestik sudah mencapai 1,3 juta barel perhari sehingga harus impor minyak mentah dan bahan bakar minyak sebanyak 700 ribu barel per hari, yang mengikis devisa kita. Walau kita juga menghasilkan gas dan batubara, suatu kajian malah meramalkan kita mulai *net energy importer* di tahun 2020. Subsidi BBM yang diberikan ternyata lebih dinikmati keluarga kaya, tidak mengenai masyarakat kurang mampu sehingga memperlebar kesenjangan sosial, di lain pihak. Jumlah subsidi yang makin meningkat menggerogoti dana negara yang diperlukan untuk pembangunan yang lebih penting seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan penghapusan kemiskinan.

Karena itu tantangan pimpinan nasional dalam pengelolaan energi adalah menggalakkan kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber-sumber baru migas di



cekungan-cekungan geologi yang belum disentuh di berbagai kawasan negara kita ini. Kapasitas kilang dalam negeri harus ditingkatkan agar tidak rawan bahan bakar minyak. Sistem subsidi diubah agar tepat sasaran. Ketahanan energi juga ditingkatkan dengan melepaskan ketergantungan yang tinggi dari minyak bumi dengan cara mendayagunakan sumber-sumber energi lain seperti gas alam, batubara, serta mengembangkan energi baru dan terbarukan seperti *coal bed methane* (CBM), panas bumi, tenaga air, bahan bakar nabati, energi matahari, energi angin, energi arus laut. Sumber-sumber tersebut mampu membebaskan Indonesia dari impor energi.

Di bidang mineral, ketegasan Pemerintah untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah, sesuai ketentuan undang-undang, patut diapresiasi dan harus diteruskan oleh pimpinan nasional mendatang. Nilai tambah mineral yang diolah akan berpuluh lipat dari harga bahan mentahnya, yang tentu akan membuka lapangan kerja yang luas dan mengungkit perekonomian dan kemakmuran negara.

Lahan kritis yang ditinggalkan para pengusaha yang tidak bertanggung jawab harus dipulihkan atau didayagunakan kembali. Antara lain sebagai lahan pertanian, hutan industri, atau sebagai hutan energi,

untuk menghasilkan tanaman sebagai sumber bahan bakar minyak nabati, baik itu yang berasal dari singkong, jarak, kemiri sunan, atau pohon selulosa, yang semuanya dapat sebagai bahan baku etanol, isobutanol, bensin atau solar sintetik. Contohnya keberhasilan di negara lain sudah banyak, seperti di Brazil, India, Thailand, dan di negara-negara maju di Barat maupun di Asia.

Pemerintah harus melakukan penataan sedemikian sehingga masyarakat ekonomi dan masyarakat terstimulasi spontan untuk mengembangkan semua sumber daya alam tersebut. Pemerintah harus menciptakan kondisi yang kondusif, baik dari sisi regulasi dan pengawasan, maupun dari sistem insentif dan harga yang menarik bagi semua pelaku, baik investor, produsen maupun konsumen. Berbagai hambatan yang dikeluhkan pengusaha harus diselesaikan, misalnya berbagai aturan yang muncul setelah otonomi daerah, berbagai pintu izin yang harus dilewati, perpajakan yang keliru interpretasi, tumpang tindih lahan, gangguan-gangguan di lapangan dari oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi dan sebagainya. Demikian juga keberpihakan kepada pengusaha nasional harus diutamakan.

Di lain pihak, semua upaya tersebut menuntut kemampuan anak

bangsa di bidang manajemen, kewirausahaan dan teknologi, di samping permodalan. Walaupun ada, masih minim inovasi teknologi yang muncul untuk mengelola sumber daya alam kita. Kita juga masih kekurangan banyak tenaga ahli dan tenaga manajemen. Data menunjukkan bahwa jumlah sarjana kita yang berkualitas jauh di bawah Singapura dan Malaysia. Di samping itu pemberlakuan pasar bebas ASEAN dalam waktu dekat malah merupakan ancaman bagi Indonesia karena akan ada serbuan tenaga-tenaga asing, yang memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih tinggi, menggerogoti peluang lapangan kerja bagi anak-anak kita. Karena itu Pemerintah harus menyiapkan program pendidikan yang lebih baik, lebih terarah, lebih banyak, untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli maupun tenaga terampil. Berbagai lembaga penelitian juga harus direvitalisasi agar menghasilkan teknologi yang diperlukan.

Dengan demikian, negara kita sedang menghadapi ancaman kehancuran sumber daya alam, tugas pimpinan nasional adalah menghilangkan dan mengubah ancaman tersebut menjadi peluang, menuju kemakmuran yang lestari bagi bangsa.

Tantangan Pemimpin Nasional dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas



Syafran Sofyan

Tenaga Professional Lemhannas RI

Menurut Sarros dan Butchatsky (1996), kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktifitas anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi.

Berdasarkan definisi diatas kepemimpinan memiliki beberapa implikasi, antara lain:

- a. Kepemimpinan berarti melibatkan orang, rakyat, atau pihak lain yaitu para anggota, karyawan atau bawahan, para anggota, karyawan atau bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin.
- b. Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang dengan kekuasaannya mampu meng-

gugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan, berdasarkan integritas, kredibilitas, dan karisma kepemimpinannya.

- c. Pemimpin harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, sosial, organisasi, anggota, rakyat, dan masyarakat, serta mempunyai integritas, sikap bertanggung jawab yang tulus, pengetahuan, keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain dalam membangun organisasi.

Model-model kepemimpinan masa kini (sekarang)

1. Model Kepemimpinan Transaksional.

Kepemimpinan transaksional adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan serta ditetapkan dengan jelas peran dan tugas-tugasnya.

Menurut Masi and Robert (2000), kepemimpinan transaksional digambarkan sebagai mempertukarkan sesuatu yang berharga bagi yang lain antara pemimpin dan bawahannya (Contingen Riward), intervensi yang dilakukan oleh pemimpin dalam proses organisasional dimaksudkan untuk mengendalikan dan memperbaiki kesalahan yang melibatkan interaksi antara pemimpin dan bawahannya bersifat pro aktif.

2. Model Kepemimpinan Transformasional

Hater dan Bass (1988) menyatakan bahwa pemimpin transformasional

merupakan pemimpin yang kharismatik dan mempunyai peran sentral dan strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya, serta mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi dari pada apa yang mereka butuhkan.

Pimpinan Nasional mendatang harus siap menghadapi tantangan besar terutama eksistensi bangsa dalam menghadapi arus globalisasi. Indonesia kedepan harus siap menghadapi persaingan global yang sangat kompetitif, dalam waktu dekat segera kita akan menghadapi kesepakatan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik mulai 2015.

Dalam menghadapi era perdagangan bebas Asia Pasifik tersebut, juga tantangan bagi daerah-daerah di Indonesia bagaimana meningkatkan daya saing daerah dan daya saing Indonesia secara akumulatif terutama di antara negara-negara Asia. Dalam era globalisasi, sesungguhnya persaingan tidak hanya terjadi antarnegara, tapi juga antardaerah, antarkorporasi, hingga antarindividu. "Karena daerah-daerah pun sudah menjadi bagian dari interkoneksi global," Pada kesempatan tersebut, di mana posisi daerah pada penerapan pasar bebas Asia Pasifik. Salah satu solusi jangka panjang untuk membangun dan memberdayakan daerah adalah perlunya dibangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan ciri dan karakteristik yang kuat sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.

Adapun hambatan kita saat ini adalah bagaimana lebih meningkatkan daya saing Indonesia, karena penerapan demokrasi di Indonesia masih sebatas demokrasi prosedural, belum menerapkan demokrasi substantif, meskipun Indonesia telah menerapkan demokrasi pada era reformasi sejak 15 tahun lalu, tapi baru sebatas demokrasi prosedural. Demokrasi seperti itu mengakibatkan, daya saing

demokrasi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara demokrasi di dunia. Meskipun secara geografis Indonesia adalah negara besar dan jumlah penduduknya terbanyak keempat di dunia, tapi kualitas demokrasi Indonesia masih rendah. Contohnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang belum optimal seperti pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tingkat partisipasi pemilih rata-rata hanya sekitar 50 persen. Apalagi, sebagian kepala daerah terpilih kemudian tersandung kasus hukum. Juga kaitan dengan Pemilu nasional, apakah pemilu legislatif, pilpres, masih banyak kendala, baik pada penyelenggara pemilu/pemilukada, penegakan hukum yang masih rendah, termasuk di lembaga-lembaga hukum, dampaknya yang kita rasakan sekarang sangat maraknya Pimpinan Nasional yang tersangkut kasus hukum.

Kedepan Pimpinan Nasional harus berani membuat terobosan yang besar, buat kemajuan dan kemakmuran bangsa dan Negara, dan menjauhkan dari kepentingan ego sektoral, kepentingan individu, kelompok, partai politik, apalagi hanya untuk memperkaya pribadi, dengan menghalalkan segala cara, ditambah lagi dengan system politik, demokrasi kita saat ini, menimbulkan biaya yang sangat tinggi (transaksional), memacu makin meningkatnya terjadinya kebocoran anggaran, baik APBN, maupun APBD, yang tentunya sangat merugikan Negara, dan menurunkan daya saing kita di era perdagangan bebas, yang sudah di depan mata. Ini semua menimbulkan kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi rendah.

Kedepan agar dapat membangun demokrasi yang lebih baik, Indonesia membutuhkan figur pemimpin nasional yang memiliki komitmen kuat untuk membangun Negara, berani dan memiliki rekam jejak yang baik, tidak cukup hanya sekadar populer. Kriteria pemimpin yang diharapkan dapat membangun negara memiliki kriteria



yakni visioner, aspiratif dan akomodatif, berintegritas, serta jujur, adil dan berdiri di atas semua golongan.

Lemhannas RI, sebagai Lembaga Negara, yang salah satu tugasnya mendidik Kepemimpinan tingkat nasional, regional, dan global, telah mengkrystalkan kualitas kepemimpinan dalam bentuk Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI), yang bisa digunakan sebagai acuan dalam menyiapkan pemimpin dan menjadi kriteria dalam memilih Pimpinan nasional. Indeks ini memuat sejumlah kriteria kepemimpinan, yang meliputi aspek moralitas dan akuntabilitas kepemimpinan. Nilai-nilai atau parameter moralitas dan akuntabilitas kepemimpinan nasional Indonesia, dalam IKNI tersebut, diperinci atas dasar 4 (empat) macam kategori yaitu:

1. **Pertama, Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Individual**
2. **Kedua, Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Sosial**
3. **Ketiga, Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Instiusional**
4. **Keempat, Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Global**

Jangan sampai kita dalam memilih calon Pemimpin seperti memilih kucing dalam karung, jadi diharapkan kepada semua pihak, Partai Politik, Ormas, Organisasi Profesi memperhatikan keempat syarat, kriteria tersebut. Dengan sistem politik saat ini, dengan sistem transaksional, hanya orang-orang yang mempunyai

kekayaan, modal ekonomi yang kuat, dan tingkat popularitas yang tinggi yang mempunyai peluang yang lebih besar, dan ini kedepan tidak sehat, dan menyimpang dari filosofi/falsafah dan tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara sesuai Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam menghadapi era perdagangan bebas saat ini, kedepan sudah saatnya kita harus meningkatkan daya saing dari segala lini, baik ekonomi, sumber daya manusia, juga menciptakan sistem politik/demokrasi yang lebih baik, murah dan transparan, agar putra-putri terbaik di Indonesia ini dapat tampil, terakomodasi, untuk membawah bangsa, Negara ini yang lebih baik, bermartabat dan terhormat.

Tentunya kehidupan demokrasi, tidak akan berjalan mulus, sesuai tujuan, kalau tidak didukung penegakkan hukum yang pasti, tegas, tanpa dipengaruhi kekuatan politik atau kekuasaan. Untuk itulah sistem penegakan hukum di Indonesia, sebaiknya juga harus dibenahi, bagaimana penegak Hukum kita agar independen, professional, dan betul-betul dapat mengayomi semua rakyat Indonesia, dan Insya allah tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara akan tercapai, sesuai dengan Tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara, yakni mencapai masyarakat, bangsa yang adil dan makmur, sejahtera dan bermartabat.

Menuju Pendidikan Humanis



Azyumardi Azra, CBE

Pendidikan Indonesia masih jauh daripada 'pendidikan humanis' (*human education*). Sebaliknya dengan melihat berbagai aspek dunia pendidikan Indonesia, yang pada prakteknya berlangsung adalah 'pendidikan yang tidak humanis' (*inhumane education*). Dengan pendidikan seperti itu, bagaimana kita bisa berharap pendidikan Indonesia dapat membangun budaya dan peradaban bangsa yang tinggi dan luhur. Berikut ini adalah sejumlah realitas atau gejala yang perlu dicermati untuk mengembangkannya pendidikan humanis.

Tawuran

Tidak *human*-nya pendidikan Indonesia, pertama bisa dilihat dari maraknya tawuran, perkelahian massal di antara para pelajar sekolah menengah dan mahasiswa. Ini jelas merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi Dunia Pendidikan Indonesia. Seolah tidak terkendali, jumlah tawuran antar pelajar sudah sangat mencemaskan. Pada 2011, jumlah tawuran antar pelajar di seluruh Indonesia mencapai 339 kasus dengan korban tewas 82 orang. Untuk 2012; di wilayah Jakarta korban tewas mencapai lima orang, termasuk

Alawy, siswa SMA 6 yang tewas dalam tawuran dengan kelompok siswa SMA 70 Jakarta pada 24 September 2012.

Sedangkan pada tingkat pendidikan dasar sembilan tahun (SD dan SMP) tawuran bukan tidak ada; tetapi boleh dikatakan relatif jarang terjadi. Jika tidak ada atau kurangantisipasi dan respon perbaikan sistem, fasilitas dan lingkungan sekolah, bukan tidak mungkin tawuran yang lazim pada anak-anak sekolah menengah juga segera menjadi fenomena umumnya di tingkat dasar.

Tawuran juga lazim terjadi di kalangan mahasiswa di berbagai kota mulai dari Medan, Padang, Jakarta, Mataram, Kendari, Makasar dan berbagai kota lain. Di kota terakhir ini (11/10/12) dua mahasiswa tewas dalam tawuran antara gerombolan mahasiswa Fakultas Teknik melawan massa mahasiswa Fakultas Seni dan Disain Universitas Negeri Makasar. Sejauh ini sulit mendapatkan angka pasti berapa jumlah korban jiwa dan fasilitas kampus dan publik yang menjadi korban keganasan gerombolan mahasiswa dalam tawuran.

Juga sangat jelas, tawuran gerombolan antar-jurusan, antar-fakultas, dan antar-universitas sangat memalukan dan mengkhawatirkan. Mahasiswa-mahasiswa yang diharapkan merupakan insan terdidik, tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan, keadaban, dan sebaliknya sangat beringas; entah bagaimana masa depan pendidikan tinggi dan bahkan kebudayaan Indonesia secara keseluruhan.

Komitmen Rendah

Tidak *human*-nya pendidikan Indonesia, terkait banyak dengan masalah besar lainnya dalam pendidikan nasional, lebih khusus pen-

didikan dasar. Menurut data yang diumumkan *The Asian-South Pacific Bureau of Adult Education and the Global Campaign for Education*, Indonesia hanya mampu menduduki ranking 10 dari 14 negara yang disurvei di kawasan Asia Pasifik; skor yang dicapai Indonesia hanya 42 dari 100 skor maksimal, atau mendapat angka E dalam komitmen kepada pendidikan dasar. Sebagai perbandingan, Thailand dan Malaysia menduduki posisi puncak dengan nilai A, yang kemudian diikuti Srilanka dengan nilai B. Sedangkan Filipina, China, Vietnam, Bangladesh, Kampuchea, dan India mendapat nilai antara C dan F. Indonesia lebih baik hanya jika dibandingkan dengan Nepal, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Pakistan.

Lebih jauh, menurut survei Bank Dunia pada 2009 yang diselenggarakan di 76 negara, Indonesia mendapatkan nilai terendah dalam hal komitmen kebijakan dan tindakan pemerintah menghapuskan biaya bagi pendidikan dasar; komitmen pemerintah sangat rendah dalam mewujudkan pendidikan dasar yang bebas biaya. Meski, konon, pemerintah sejak masa rezim Soeharto menetapkan kebijakan pendidikan dasar 'gratis', tetapi murid dalam praktiknya tetap dibebani SPP, uang pangkal dan macam-macam biaya lainnya uang buku teks, uang pakaian seragam, dan iuran-iuran wajib lainnya. Bahkan pembiayaan pendidikan dasar kini terus meningkat; dalam hal peningkatan pembiayaan, hampir tidak ada lagi perbedaan signifikan antara SD/MI-SMP/MTs negeri dan SD/MI-SMP/MTs swasta.

Karena itu tak mengherankan kalau persentase anak-anak yang putus sekolah juga terus meningkat. Menurut sebuah survei nasional pada 2009, sekitar 6.7 persen dari 40 juta anak usia sekolah (tujuh sampai 15 tahun) terpaksa putus sekolah. Sekitar 67.6 persen anak-anak yang putus sekolah menyatakan mereka berhenti sekolah karena orangtua mereka tidak lagi mampu membayar biaya pen-

didikan yang terus meningkat setiap tahun sampai sekarang.

Dengan demikian jelas, salah satu akar masalah pendidikan Indonesia adalah pembiayaan. Karena itu, tanpa peningkatan pembiayaan dari pemerintah, jelas pendidikan kita sangat sulit untuk bisa keluar dari berbagai problem, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak *human*. Memang UUD 1945 (setelah amandemen) menetapkan, anggaran pendidikan 20 persen, yang dipikul pemerintah pusat dan daerah, tetapi, kita semua mengetahui, masih sangat banyak gedung sekolah yang tidak layak dengan fasilitas sangat minim.

Jelas pula, pemerintah baik pusat maupun daerah tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas pendanaan pendidikan, misalnya, dengan mengharap agar masyarakat memberikan sumbangan lebih besar lagi bagi pembiayaan pendidikan kita. Dengan kondisi ekonomi yang masih berat di berbagai daerah, sulit diharapkan masyarakat dapat memberikan partisipasi lebih besar.

Jelas, tanpa pendanaan yang memadai, bangunan-bangunan sekolah yang sudah begitu banyak hampir rubuh tidak bisa segera diperbaiki; kualitas guru tidak bisa ditingkatkan; dan buku-buku teks dan fasilitas penunjang lainnya tak bisa tersedia dengan baik. Kita tahu, sekarang ini hanya sekitar 10 sampai 20 persen guru yang memiliki

kompetensi di atas rata-rata untuk dapat mengangkat mutu pendidikan dasar kita. Lebih parah lagi, rasio guru-murid di Indonesia yang sangat tidak sesuai, yakni 1:62

Kurang tersedianya fasilitas memadai baik ruang kelas, ruang istirahat murid dan guru, kantin, dan ruang/lapangan dan alat kesenian dan olahraga menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak manusiawi alias tidak *human* yang pada gilirannya menjadi salah satu akar pokok tawuran di antara para peserta didik. Dengan fasilitas relatif terbatas, siswa tidak dapat menyalurkan bakat dan minat serta mengeluarkan energi yang bergejolak. Karena itu, banyak di antara mereka terdorong untuk *nongkrong* dan menjadi gerombolan beringas.

Kurikulum

Sekali lagi lingkungan pendidikan yang tidak *human* mendorong meningkatnya keberingasan gerombolan siswa (dan juga mahasiswa) yang meledak menjadi tawuran. Pendidikan nasional semakin tidak *human* dengan adanya dengan kurikulum nasional [dan lokal] yang sangat berat (*overloaded*). Anak-anak sejak dari SD/MI, SMP/MTsN, SMA/MA sampai Perguruan Tinggi dijejali dengan kurikulum yang luarbiasa berat: rata-rata 8-11 matapelajaran/matakuliah per-semester. Karena itu, tas mereka sangat berat, penuh dengan buku teks dan buku pendamping untuk mereka pelajari di sekolah.

Dengan beban kurikulum yang begitu berat, lembaga pendidikan formal/sekolah/kampus lebih merupakan lingkungan tidak *human* tempat 'penyiksaan' bagi anak-anak daripada tempat yang ramah untuk menimba ilmu dan membentuk karakter-kepribadian. Sekolah bukan lagi tempat yang menyenangkan (*enjoyable*) yang memberikan inspirasi dan semangat. Sekolah membuat anak-anak menjadi *bete* dan *butek* sehingga mudah emosional yang sering berujung dengan tawuran.



Beban kurikulum yang demikian berat, membuat hampir tidak ada lagi ruang yang tersisa untuk imajinasi kreatif para peserta didik. Semua bahan yang diberikan guru harus secara kognitif dikuasai peserta didik. Kalau anak dan orangtua tidak/belum yakin dapat memahami dan menguasai apa yang diberikan guru, ditambah lagi dengan 'bimbel' dan guru privat yang datang ke rumah. Kelelahan dan kesumpekan kian menggayuti anak-anak, sehingga sulit diharapkan mereka dapat mencapai hasil maksimal dari penggenjotan ini.

Meski mereka telah digenjot habis-habisan, tidak ada jaminan mereka dapat diterima pada jenjang pendidikan lebih tinggi, khususnya yang berkualitas. Jika pun mereka diterima sekali lagi orangtua harus siap mengeluarkan dana dalam jumlah cukup besar; menjadi 'siksaan' ekonomi dan sosial bagi kalangan masyarakat yang hidup pas-pasan.

Maka, sumber 'siksaan' bagi anak-anak didik harus dibenahi. Kurikulum yang demikian berat harus disederhanakan. Wakil Presiden Boediono dalam artikelnya (bukan arahan pada Raker Depdikbud) yang dimuat *Kompas* 27 Agustus 2012 menyatakan, "sampai saat ini kita belum punya konsepsi yang jelas mengenai substansi pendidikan. Karena tidak ada konsepsi yang jelas, timbullah kecenderungan untuk memasukkan apa saja yang dianggap penting ke dalam kurikulum. Akibatnya, terjadilah beban berlebihan pada anak didik. Bahan yang diajarkan terasa 'berat', tetapi tidak jelas apakah anak mendapatkan apa yang seharusnya diperoleh dari pendidikan".

Untuk itu, kurikulum sejak dari pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi harus disederhanakan. Penyederhanaan itu dapat dilakukan dengan kembali kepada mata pelajaran/mata kuliah pokok. Yang lain-lainnya, yang dalam istilah Prof A Malik Fadjar hanyalah 'recehan' agar dikembalikan kepada induknya

tersebut. Dengan begitu, satu semester anak-anak perlu mengikuti sekitar 4 sampai 6 mata pelajaran saja; dan sehari cukup 3-4 mata pelajaran saja.

Entah sebagai respon terhadap tawuran yang masih marak, atau karena faktor lain, seperti artikel Wapres Boediono, Depdikbud akhir September 2012 merancang 'penyederhanaan kurikulum' SD yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2013-14. Sekarang ini ada 11 mata pelajaran pada tingkat SD: Agama, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Penjas Orkes, SBK, Mulok Provinsi, Mulok Kabupaten/Kota.

Wamendikbud, Musliar Kasim menyatakan, kurikulum SD yang sangat berat itu bakal dikurangi sehingga tinggal enam pelajaran: Agama, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya, dan Matematika. Juga menggabungkan mata pelajaran IPA dan IPS menjadi 'Pengetahuan Umum' yang diajarkan secara *integrated* melalui Bahasa Indonesia. 'Kurikulum yang disederhanakan' itu konon akan menekankan pada kemampuan peserta didik yakni '**Calistung**' (baca tuling hitung).

Meski begitu, bagi saya tetap tidak terlalu jelas kerangka dasar kurikulum yang disederhanakan itu. Dalam pada itu, mulai banyak muncul pertanyaan dari kalangan masyarakat, khususnya menyangkut ketiadaan mata pelajaran Bahasa Inggris yang diperlukan agar peserta didik memiliki bekal menghadapi globalisasi, dan juga tentang rencana penggabungan IPA dan IPS menjadi 'Pengetahuan Umum' yang diajarkan melalui Bahasa Indonesia.

Jika dirasa dengan kurikulum lebih ramping masih ada yang perlu diketahui anak-anak, mereka dapat didorong mencari sendiri tokoh belajar dan menuntut ilmu tidak terbatas hanya di ruang kelas. Di zaman informasi instan sekarang, anak-anak sudah sangat terpapar kepada berbagai informasi, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan melalui dunia maya (*internet*). Karena itulah, tidak

seluruh ilmu harus lagi diberikan di sekolah yang pada gilirannya menjadi beban sangat berat dan berujung pada siksaan kepada anak-anak.

Di sini filsafat pendidikan konvensional 'tabularasa' bahwa anak-anak adalah 'kertas putih' yang bisa ditulisi dan harus ditulisi sebanyak-banyaknya harus diubah. Filsafat pendidikan semacam ini terbukti tidak lagi sesuai dengan zaman informasi instan sekarang; dan juga tidak sesuai dengan HAM dan perlindungan anak-anak.

Karena itu, filsafat pendidikan yang dianut sekarang haruslah juga lebih humanis, yang ramah pada peserta didik. Hanya dengan cara itu pula dapat dibuat kurikulum dan evaluasi yang juga ramah, sesuai HAM anak dan melindungi mereka dari 'siksaan' pendidikan.

Keterpaparan peserta didik kepada beragam informasi dan (ilmu) pengetahuan di dunia maya *on-line*, tidaknya mengharuskan perubahan filsafat pendidikan dan penyederhanaan kurikulum, sekaligus pula menuntut perubahan cara, metode, dan pendekatan pembelajaran. Pembelajaran semestinya tidak lagi 'satu arah', monolog, dan bahkan indoktrinasi; sebaliknya harus dialogis, *participatory*, *role-playing* dan berbagai metode pembelajaran baru lainnya yang sekaligus bisa mengembangkan kognisi, afeksi dan psiko-motorik peserta didik sekaligus.

Untuk itu, para guru/dosen mesti pula memiliki filsafat pendidikan baru tersebut, dan sekaligus dapat mengadopsi dan menerapkan cara, metode, dan pendekatan baru tersebut. Tak kurang penting, guru/dosen mesti pula mengembangkan sikap human dan empati kepada setiap peserta didik; menyantuni mereka dengan sepenuh hati, sehingga mereka dapat teringankan dari berbagai masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-harinya, baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, dapat teringankan.



Agustina Wromi, S.E., M.M.
Pembantu Ketua I Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan STIE Ottow & Geissler Fakfak
Peserta PPRA LI

Urgensi Peningkatan Pendidikan Politik Pemilih

“Saya melihat dalam pelaksanaan pemilu, baik dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), masih belum sesuai dengan yang diharapkan,” kata Agustina Wromi, Pembantu Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, STIE Ottow & Geissler. Menurutnya, pemilu belum mengikutsertakan masyarakat menjadi obyek utama dalam demokrasi nasional Indonesia.

“Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, sementara kondisi saat ini, kita sama-sama melihat bahwa hak memilih rakyat belum dihargai, ini terlihat dari masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu di beberapa daerah,” Agustina menambahkan.

Agustina berharap, pemerintah, media dan masyarakat dapat bersama-sama meningkatkan partisipasi masyarakat. “Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan politik masyarakat dan sosialisasi peraturan-perundangan serta pedoman,” kata Agustina. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, Agustina melihat perlunya pemimpin di masa depan untuk meningkatkan sumber daya manusia, peningkatan fasilitas kesehatan, pengembangan infrastruktur, pengembangan energi, potensi kelautan, dan peningkatan kualitas demokrasi.



Ir. Tundra Meliala, M.M.
Ketua Umum PP Persatuan Wartawan Nasional
Peserta PPRA LI

Media Massa dan Keberpihakan Dalam Pemilu

“Saat ini media massa terlihat tidak independen, ini terlihat dari tayangan dari media massa yang berkoalisi dengan partai atau capres cawapres tertentu,” kata Ir. Tundra Meliala, M.M.

Tundra berpendapat, media seharusnya dapat menjadi penyeimbang untuk memberikan pemahaman politik bagi masyarakat. Dalam masa tenang, sejumlah parpol sudah menayangkan iklan politik di berbagai media massa lokal maupun nasional. Iklan politik tersebut sudah mirip dengan kampanye melalui media massa cetak dan elektronik, padahal parpol belum diperbolehkan melakukan kampanye melalui media massa.

“Kita mengharapkan media dapat independen. Harus terlepas dari penguasa dan pengusaha, sehingga media dapat menjadi penyeimbang, antara kebebasan ber aspirasi dengan kepentingan politik,” kata Tundra

Sebelum 24 Maret 2014, KPI telah memberikan sanksi administrasi kepada delapan lembaga penyiaran karena menayangkan iklan politik melebihi batas spot dan durasi yang ditentukan UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012. KPI mencatat, delapan lembaga penyiaran menayangkan iklan dari 11 sampai 23 spot. Dari batasan yang ditentukan hanya 10 spot per hari.

“Meskipun telah terlihat keberpihakan media massa pada pasangan tertentu, saya berharap ada kecerdasan dari masyarakat untuk membedakan mana tayangan yang baik dan mana yang buruk,” Tundra menambahkan.



Prof. Dr. Ir. H. Syarif Imam Hidayat, M.M.
Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Agrobisnis
UPN Veteran Jawa Timur
Peserta PPRA LII

Pemerintah Baru Perlu Membuat Kebijakan yang Terintegrasi

Terkait dengan suksesi pimpinan nasional melalui penyelenggaraan pilpres pada 9 Juli 2014 ini, Prof. Dr. Ir. H. Syarif Imam Hidayat, M.M. memandang pemerintah ke depan perlu mengembangkan Karakter Kebangsaan atau *Nation Character Building* bagi generasi muda. "Saya sebagai pendidik melihat banyaknya dekadensi moral yang terjadi pada generasi muda kita. Banyak yang bangga menggunakan produk luar negeri dibanding produk dalam negeri," kata Syarif Imam.

Selain permasalahan dekadensi moral, Syarif juga prihatin atas kritisnya lahan pertanian Indonesia. Sejumlah lahan pertanian di Indonesia saat ini sedang menuju kondisi kritis. Ukuran lahan yang sangat kecil, diperparah dengan banyaknya alih fungsi lahan.

Guru Besar UPN Veteran Jawa Timur itu melihat perlunya upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. "Kebijakan pemerintah harus terpadu dari hulu hingga hilir. Kebijakan yang dilakukan harus tersinergikan, simultan, dan terpadu," kata Syarif menjelaskan. Masalah yang dihadapi di lapangan misalnya perbedaan penamaan pada insitusi pertanian di berbagai daerah, hal tersebut berdampak pada perbedaan persepsi terhadap tugas masing-masing. Otonomi daerah bukan berarti berdampak pada perbedaan pengembangan pertanian. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat justru harus sinergis dalam membuat kebijakan.



Dr. Rusli Yusuf, M. Pd.
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Peserta PPRA LII

Pemimpin Nasional Mampu Mengambil Kebijakan Berdasar Kepentingan Nasional

"Pemimpin nasional yang baik adalah mereka yang mampu mengambil kebijakan berdasar kepentingan nasional dan berdasarkan lima nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial," kata Dr. Rusli Yusuf, M.Pd.

Ia melihat Indonesia telah mencapai perkembangan ekonomi yang membanggakan, namun demikian masih terjadi *gap* ketimpangan ekonomi, antara kaya dan miskin, antara pusat dan daerah. "Saat ini banyak masyarakat di daerah terpencil, berpendapat bahwa pusat tidak memikirkan daerah, atau banyak masyarakat yang merasa perlu melakukan tindakan kekerasan. Hal tersebut disebabkan belum terpenuhinya kebutuhan mereka," Rusli menambahkan.

Rusli melihat, tantangan terbesar yang dihadapi pemimpin nasional yakni bagaimana membangun dengan kebijakan yang terintegrasi dalam konsep Wawasan Nusantara. Dengan konsep Wawasan Nusantara dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, diharapkan dapat merubah paradigma kedaerahan. "Sumber Kekayaan Alam dapat dijadikan perekat bangsa, dimana kekayaan satu daerah dapat menyejahterakan satu negara. Selain itu, kesejahteraan juga bukan masalah pendapatan, tapi juga keamanan, kesehatan, dan lancarnya komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat," kata Rusli.

Diabaikan Lebih Berbahaya dari di *Bully*

Saat ini media sering diramaikan oleh kasus *bullying*, baik di lingkungan kerja atau sekolah. Demikian juga dengan kemungkinan korbannya yang akan mengalami depresi dan kesehatan yang menurun. Tetapi apakah benar di-*bully* berbahaya?

Ternyata tidak, dalam sebuah studi yang dilakukan oleh ilmuwan memperlihatkan, jika diabaikan lebih berbahaya bagi kesehatan jika dibandingkan dengan di-*bully*, terutama di lingkungan kerja.

Penelitian yang dilakukan memperlihatkan diabaikan memberikan dampak ketidakpuasan diri, menghentikan kegiatan, dan masalah kesehatan.

“Mengabaikan seseorang berdampak terhadap masalah sosial. Mereka yang dikucilkan akan merasa tidak berdaya, dan tidak layak mendapatkan perhatian,” ucap Profesor Sandra Robinson dari Universitas Bisnis di Inggris yang kami kutip dari Mail Online.

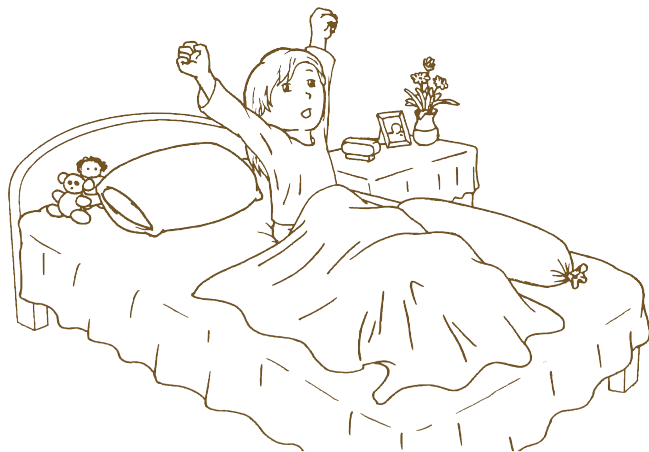
Diabaikan akan memiliki dampak psikologis yang lebih kuat, ada rasa tergedradasi untuk melakukan hal



yang sama yang orang lain lakukan. Sehingga rasa ketidakadilan akan dimiliki mereka yang merasa diabaikan atau dikucilkan.

Oleh sebab itu, penting untuk kita selalu menyapa atau memperhatikan mereka yang jarang diperhatikan di lingkungan kita, baik itu rumah, pekerjaan atau sekolah. Agar mereka merasa ada di antara Anda dan lingkungan.

Sumber: <http://balabal10.blogspot.com/>



Jangan Langsung Bangun Tidur, Santai Dulu

Tiga kali [½ Menit], mungkin kebanyakan orang banyak yang belum mengetahui 3 x ½ menit, namun para ahli ternyata sering berpesan setiap orang harus memperhatikan 3 x ½ menit.

Kenapa demikian? Memang 3 x ½ menit adalah sesuatu yang terkesan sia-sia, tetapi dibalik itu akan banyak mengurangi angka kematian secara tiba-tiba!

Sering kali terjadi seseorang siangnya masih sehat wal ‘afiat, tetapi malamnya meninggal. Tidak jarang pula kita mendengar cerita orang, kemarin saya masih ngobrol dengan dia, kenapa tiba-tiba dia meninggal?

Banyak para ahli yang mengindikasikan bahwa penyebabnya adalah ketika bangun malam untuk ke kamar mandi sering dilakukan secara terlalu cepat. Begitu berdiri, otak kekurangan darah. Inilah mengapa perlu “3x ½ Menit”? Karena pola ECG (*Electro Cardiogram*) seseorang normal pada siang hari, tetapi bangun tengah malam untuk melaksanakan kegiatan tiba-tiba gambar ECG itu dapat berbeda. Karena dengan tiba-tiba bangun, otak akan menjadi *anaemic*, dan mengalami gagal jantung karena kekurangan darah.

Dianjurkan oleh para ahli untuk menjalankan “3 kali ½ menit”, yakni:

1. Bila terbangun jangan langsung turun dari tempat tidur, tetapi berbaringlah selama ½ menit.
2. Duduk di tempat tidur selama ½ menit.
3. Turunkan kaki, duduk di tepi ranjang selama ½ menit.

Setelah 3 x ½ menit yg dilakukan tanpa harus membayar se-sen pun, otak tidak akan *anaemic*, dan jantung tidak akan mengalami kegagalan, mengurangi kemungkinan jatuh dan meninggal ketika bangun tengah malam.

Pernah setelah membaca tulisan ini, seorang usia lanjut menangis dan menyesali kenapa tidak mengetahui hal ini jauh-jauh hari. Dua tahun lalu dia bangun tengah malam untuk buang air kecil, di kamar mandi tiba-tiba terasa dunia berputar dan jatuh, atau disebut juga dengan fertigo, akibatnya dia sekarang mengalami kelumpuhan dan tidak bisa meninggalkan tempat tidur. Sumber: <http://www.thecrowdvoice.com/>



Pemprov DKI Tertibkan PKL di Monas Lewat Pergub Baru

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menduduki Monas kini sedang ditertibkan oleh pemerintah Daerah DKI Jakarta. Penertiban dilakukan setelah Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kecewa atas banyaknya sampah dan fasilitas yang rusak usai penyelenggaraan Pekan Rakyat Jakarta Monas yang berlangsung 10 – 15 Juni 2014 lalu.

Ahok berjanji akan melakukan hal yang sama di titik-titik yang sering jadi biang kemacetan, Selasa (17/6/2014). Dia berujar, penataan PKL akan dilakukan di seluruh wilayah DKI. Ahok ingin para pedagang kaki lima berjualan di areal khusus, yang tetap dekat dengan keramaian seperti trotoar dan taman, namun dalam kondisi yang lebih teratur. "Sama semuanya, makanya nantinya kita mau dorong dia (PKL) berjualan di taman dan di trotoar, tapi akan kita atur bertahap," jelasnya.

Sejak Senin pagi (16/4/2014), lebih dari 400 petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan petugas UPT Monas dikerahkan untuk merazia dan mengusir PKL dari Monas. Instruksi pembersihan kawasan yang jadi ikon ibu kota itu disampaikan langsung oleh Wagub DKI Ahok. Hingga hari ini penertiban masih terus dilakukan hingga nanti Monas benar-benar steril dari PKL. Meskipun demikian, sebelumnya Ketua Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) mengkritik Pemprov DKI yang tidak melakukan sosialisasi dan tidak melibatkan PKL itu sendiri.

"PKL tidak mengelola sampah sisa berjualan. Sampah-sampah ini menumpuk di banyak tempat sekitar Taman Monumen Nasional, banyak sekali sampah di banyak tempat," kata Ahok di Balai Kota (16/6). Kekecewaan Ahok berpangkal pada abainya para pedagang terhadap

tanggung jawab mereka atas kebersihan kawasan Monas. Menurut dia, pedagang yang telah memperoleh stand untuk berjualan seharusnya turut menjaga kebersihan lokasi itu selama acara berlangsung. Apalagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak mengutip retribusi bagi pedagang yang berpartisipasi. "Menurut saya, PRJ Monas kemarin itu pasar malam kampung saya di Belitung yang dipindahkan ke Monas," Ahok menambahkan. Ahok memerintahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengosongkan kawasan Monas dari pedagang kaki lima. Untuk itu, Ahok menyatakan bakal mengevaluasi penyelenggaraan acara itu pada pekan depan. Evaluasi bertujuan memeriksa kompetensi Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta untuk kembali menyelenggarakan acara serupa pada tahun depan.

Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah mengatakan akan menegakkan Peraturan daerah di Provinsi DKI Jakarta untuk Monumen Nasional (Monas). Monas sebagai ikon Jakarta dan ikon nasional wajib dibenahi mulai dari keindahan, ketertiban, sampai keamanannya. "Sebentar lagi akan dipersiapkan Pergub (Peraturan Gubernur) untuk Monas yang lebih profesional. Dalam waktu dekat akan lahir Pergub tentang Pengelolaan Monas," kata Saefullah kepada *Kompas.com*, Selasa (17/6/2014).

Saefullah mengatakan, hingga kini, Pergub tersebut belum diketahui kapan diputuskan. Sebab, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama baru memerintahkan Biro Organisasi dan Tatalaksana (Ortlala) DKI Jakarta untuk mempersiapkan Pergub tersebut. (EH)



Tahun ini, pemerintah Iraq menghadapi ancaman dari kelompok militan yang melakukan banyak perebutan wilayah negara dengan cara yang brutal dan kejam. Ancaman ini datang dari kelompok ISIS, sebuah cabang kelompok Al-Qaeda yang kini telah membunuh sekitar 170 tentara Iraq di Mosul. Dalam laman twitternya, kelompok militan itu sendiri mengklaim telah membunuh lebih dari 1700 prajurit pemerintah Iraq. Untuk memperkuat klaim tersebut, mereka mengunggah gambar-gambar yang menunjukkan proses pembunuhan tentara-tentara Iraq dan gambar mayat-mayat yang bergelimpangan saat proses pembantaian sudah selesai.

ISIS adalah akronim dari *Islamic State in Iraq and Syria*, sebuah kelompok militan yang dibentuk oleh Al-Qaeda di Iraq pada April 2013. Meskipun pada akhirnya Al-Qaeda sendiri tidak mengakui keberadaan ISIS sebagai bagian dari mereka karena praktek jihad yang terlampau sadis, kelompok ISIS tumbuh menjadi salah satu organisasi kontra pemerintah terbesar di Syria dan Iraq. Pada Maret 2013, ISIS berhasil merebut Raqqa, sebuah ibukota provinsi di Syria dan pada Januari 2014 ISIS memanfaatkan ketegangan antara masyarakat minoritas Sunni Iraq dengan pemerintah yang dipimpin oleh Syiah untuk menguasai kota Sunni Fallujah, di Provinsi Barat Anbar.

Iraq dan ISIS: Bukan Perang Syiah dan Sunni

Internet untuk menutup seluruh saluran ke dunia maya di lima provinsi dari 19 provinsi di negeri itu. Hal ini dilakukan untuk mencegah pemanfaatan internet oleh ISIS yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi penyerangan.

Kini, Ibu kota negara Iraq, Baghdad, menjadi sasaran utama penyerangan ISIS berikutnya. Penggulingan pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Nuri Al-Maliki menjadi tujuan penyerangan. Mengetahui hal tersebut, pemerintah Iraq menyatakan telah meningkatkan pertahanan di kota tersebut, tetapi nyatanya, pada Senin (16/6) rangkaian serangan bom di kota tersebut mampu menewaskan 15 orang dan melukai 30 orang lainnya. Dengan adanya teror tersebut, berbagai konsulat negara asing yang berkantor di kota tersebut mulai mengungsikan pegawainya. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat sendiri menyatakan telah mengevakuasi sejumlah staff kedubesnya dan mengeluarkan peringatan perjalanan (*travel warning*) untuk bepergian ke Iraq bagi para warganya.

Pemimpin militer Iraq Jenderal Mohammed al-Quraishi mengatakan telah menghambat ISIS yang kini bermarkas di kota yang berjarak 48 km dari Baghdad. Dalam operasi pengamanan kota ini tentara Iraq tidak sendiri, melainkan bersama para warga sipil yang partisipasinya meningkat tajam setelah ulama utama Syiah Iraq, Ayatullah Ali al-Sistani, mengimbau rakyat untuk angkat senjata melawan kelompok milisi ISIS, pada Jumat (13/6).

Pelan-pelan kelompok militan ini mulai merangsek ke pusat negara Iraq. Dimulai dengan menguasai kota terbesar kedua di negara tersebut, Mosul, ISIS juga membebaskan 1000 tahanan dari penjara-penjara yang ada. Pemerintah Iraq yang awalnya menyebut ISIS sebagai pemberontak, kini menaikkan status siaganya dan menyebut kelompok ini sebagai teroris. Saat ini Menteri Komunikasi Iraq bahkan meminta penyedia layanan



Menjawab Permasalahan Kebangsaan Melalui Dialog Kebangsaan Pimpinan Tingkat Nasional

Dalam upaya memperkuat karakter kebangsaan pimpinan nasional di tengah tantangan globalisasi, Lemhannas RI mengadakan rangkaian acara Dialog Kebangsaan Pimpinan Tingkat Nasional Tahun 2014 yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA tanggal 8 Mei 2014 di Gd. Dwi Warna Purwa Lt. 1 Lemhannas RI. Pembukaan ini sekaligus menjadi tahap pertama sebagai ajang *brainstorming* dan peletakan koridor pemahaman konsep wawasan kebangsaan ke-Indonesia-an. Narasumber dalam tahap I ini adalah Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi, S.E., dan Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar yang membahas tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional pada sesi I dan Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra Wingarta, S.I.P., M.Sc. serta Dr. Anhar Gonggong yang menjadi narasumber untuk sesi II untuk tema kewaspadaan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Dialog tahap II diselenggarakan pada tanggal 12-14 Mei 2014 yang difokuskan pada isu ekonomi dan politik. Yang menjadi narasumber pada tanggal 12 adalah Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Sedangkan pada tanggal 13 Mei, acara dialog dibagi atas dua sesi, sesi pertama mengusung tema Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam (SKA) dengan menghadirkan narasumber Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Lemhannas RI Dr. Rosita S. Noor, MA sedangkan

sesi kedua menghadirkan pengamat politik Eep Saefulloh Fatah. Pada tanggal 14 Mei, dialog mengusung tema Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam dan Ekonomi yang menghadirkan Tommy Suryopratomo sebagai pembicara untuk sesi pertama dan Prof. Dr. Amir Santoso, M.Sc, Ph.D., untuk tema “partai politik di Indonesia” pada sesi kedua.

Dialog tahap III yang dilaksanakan pada tanggal 19, 21 dan 22 Mei 2014 difokuskan pada isu sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Yang menjadi narasumber untuk sesi sosial budaya antara lain Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Prof. Dr. Sudaryono, Tenaga Pengajar Bidang Sosial Budaya Prof. Dr. N. Jenny MT. Hardjatno dan Drs. Sukendramartha, M.Sc. Sedangkan sesi pertahanan dan keamanan menampilkan narasumber Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Letjen Tni (Purn) Kiki Syahnakri, dan Dr. Eddy Prasetyono.

Rangkaian kegiatan Dialog Kebangsaan Pimpinan Tingkat Nasional Tahun 2014 Lemhannas RI ini dimaksudkan untuk memberi masukan yang konstruktif terkait masalah kebangsaan bagi pimpinan nasional. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang dilaksanakan pada bulan Maret 2014. Berbagai kalangan dari badan eksekutif, legislatif dan yudikatif, maupun para politisi ikut menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan ini.



Rangkaian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI di Daerah

Lemhannas RI melalui Deputi Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda di 5 kota, yaitu di kota Padang pada 29 April 2014, Jambi pada 5-6 Mei 2014, Balikpapan pada 8 Mei 2014, Kupang pada 16 Juni 2014, dan Palembang pada 16-17 Juni 2014.

Kegiatan tersebut diadakan untuk mentransformasikan nilai-nilai kebangsaan berdasarkan empat konsensus dasar nasional guna meningkatkan wawasan kebangsaan peserta. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini juga disiarkan oleh TVRI, RRI, dan media massa setempat, dengan sasaran agar nilai-nilai kebangsaan dapat dipahami secara luas oleh masyarakat di daerah tersebut.

Keragaman suku, budaya, bahasa, etnis, golongan, dan agama, di satu sisi dapat menjadi kekuatan positif dalam pembangunan bangsa, namun di sisi lain mengandung potensi konflik yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi titik retak persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk itu, Gubernur Lemhannas RI menegaskan tentang pentingnya penguatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan. "Pemahaman nilai-nilai kebangsaan merupakan kebutuhan mutlak, agar bangsa ini tidak terjebak euforia demokrasi yang justru bergerak menjauh dari Pancasila sebagai jati diri bangsa," ungkap Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA dalam sambutan tertulisnya.

Peserta akan dibekali materi-materi yang terkait dengan empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, mereka juga akan diberi pemahaman tentang konsepsi nasional seperti Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional, dan Kepemimpinan Nasional.

Dengan nilai dan karakter kebangsaan yang kuat, maka tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda yang dirangkul ini nantinya diharapkan bisa menjadi agen perubahan yang efektif di lingkungannya masing-masing. Semua materi yang diberikan kepada peserta disampaikan dengan metode dialog dan diskusi yang melibatkan partisipasi aktif dari para peserta.

Bayu Adjie Pratama
Pegawai Teladan Lemhannas RI

“Manajemen Waktu dan Kedisiplinan, Awal Menuju Keberhasilan”

Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahunnya yang ke-49, Lemhannas RI pada bulan Mei lalu menyelenggarakan berbagai macam perlombaan yang diikuti oleh segenap anggotanya. Salah satunya adalah lomba pemilihan pegawai teladan.

Adalah Bayu Adjie Pratama (26) yang tahun ini terpilih menjadi pegawai teladan Lemhannas RI. Dalam lomba yang diikuti oleh perwakilan dari tiap biro dan kedeputian di Lemhannas RI, ia terpilih menjadi pemenang setelah mengikuti serangkaian seleksi ketat yang diadakan oleh panitia.

Menurut Bayu, ketika diwawancarai Redaksi Swantara pada Rabu (11/6/2014), keikutsertaannya dalam lomba tersebut adalah atas usulan dan penilaian dari para atasannya di Inspektorat Lemhannas RI. Secara pribadi ia mengaku tidak terlalu berambisi untuk menjadi pemenang dan mendapatkan status pegawai teladan.

“Saya menjalani seluruh prosesnya secara biasa saja, dan kebetulan rekan-rekan saya lainnya dari Inspektorat sudah duluan mengikuti lomba lainnya, seperti pengucapan Panca Prasetya Korpri dan olahraga. Jadi dorongan utama untuk berpartisipasi dalam lomba ini adalah untuk turut serta meramaikan peringatan hari jadi ke-49 Lemhannas RI”, ujar Bayu yang merupakan lulusan Universitas Padjajaran (Unpad Bandung) ini.

Bayu mengaku tidak terlalu paham dengan seluruh kriteria yang menjadi dasar penilaian para juri. “Untuk mekanismenya begini. Pertama sekali, saya lapor dulu ke Panitia sebagai perwakilan dari Inspektorat. Kemudian, pada hari pengujian, kita dites di sebuah ruangan di depan panel juri yang terdiri dari sembilan orang pejabat Eselon III”, jelas pria kelahiran Bandung ini.

Banyak hal yang ditanyakan dan dinilai para juri dalam sesi tersebut, termasuk wawasan, kedisiplinan, atribut atau kelengkapan seragam para peserta lomba. Namun satu hal yang cukup berkesan bagi Bayu adalah ketika ia diminta untuk memberikan pandangannya terkait beberapa skenario/kasus di mana ia diposisikan sebagai seorang pemimpin yang harus menyelesaikan suatu konflik di tempat kerja.

“Itu hal yang sulit mengingat saat ini situasi kita adalah sebagai pegawai biasa, pekerja”, tuturnya. Kendati diakui bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang menarik karena ia diharapkan untuk berpandangan jauh ke depan dan memahami lebih lanjut tentang manajemen konflik, khususnya di lingkungan tempat kerja. “Jadi kita tidak hanya sebatas mengetahui tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sehari-hari kita”, ujar pria yang masih bujangan ini.

“Selain pengujian oleh panel juri, juga ada wawancara tatap muka secara empat mata dengan salah seorang pejabat Lemhannas RI”, tambah Bayu.

Kendati sudah terpilih sebagai pegawai teladan Lemhannas RI untuk tahun ini, Bayu mengaku tidak melakukan atau pun merasakan perubahan apa pun dalam kesehariannya. “Semuanya biasa aja, saya kerja seperti biasa. Dan ekspektasi orang lain juga biasa saja. Tidak ada yang berubah”, ujarnya.

Kegiatan luar kantor yang dijalannya saat ini adalah kuliah untuk program ekstensi Manajemen S1 di Lembaga Administrasi Negara (LAN).





“Sebenarnya kuliah saya sudah beres semua. Sekarang tinggal menyusun skripsi”, ungkap pria berdarah Sunda ini.

Di samping kegiatan kerja kantoran dan perkuliahan, Bayu juga memiliki kegiatan lain yang turut memberikan penghasilan tambahan yang cukup lumayan. “Saya senang dagang, jualan baju dan kaos produksi sendiri secara online, dan Alhamdulillah, lumayan sukses”, ucapnya bangga. Bisnis tersebut mulai ditekuninya setelah hobinya bermain motor cross harus berhenti ketika motor crossnya harus dijual karena suatu permasalahan.

Dengan segala kesibukan yang dijalannya, ia mengaku tidak merasa keteteran berkat manajemen waktu dan kedisiplinan yang diterapkannya. “Untuk bisnis saya, itu saya tekuni dan kembangkan pada malam hari, di luar jam kerja”, ujar pria bertubuh jangkung yang menggemari masakan Jawa ini. Baginya manajemen waktu dan kedisiplinan merupakan dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan oleh siapa pun yang ingin mencapai keberhasilan yang diharapkan. “Itu merupakan salah satu kunci menuju keberhasilan”, ujarnya mantap.

Masuk Lemhannas RI tahun 2010, Bayu yang ber-saudara satu orang ini terdorong menjadi pegawai negeri sipil (PNS) setamat kuliah karena faktor orang tua yang memang sudah berprofesi sebagai PNS.

“Almarhum bapak saya PNS. Begitu pula ibu saya yang bekerja sebagai PNS di Pemda Provinsi Bandung saat ini. Mereka mendorong saya untuk menjadi PNS juga”, cerita Bayu. Almarhum Bapak saya meninggal tahun 2009.

Sebagai anak paling besar, mau tidak mau saya dituntut untuk jadi tulang punggung keluarga kendati ibu saya masih bekerja. “Alhamdulillah, saya bisa lolos seleksi dan diterima masuk Lemhannas RI”, kenang Bayu.

Sebagai pegawai yang tergolong baru di Lemhannas RI, secara umum Bayu menilai Lemhannas RI sebagai lembaga yang unik karena selain pegawai PNS-nya, di dalamnya juga terdapat pegawai dengan *background* TNI dan polisi sehingga menimbulkan nuansa dan dinamikanya tersendiri. “Awal-awal masuk agak kaget juga dengan budaya yang ada di sini, cuma lama-kelamaan kita bisa adaptasi dan tahu bagaimana memosisikan diri di lingkungan Lemhannas RI”, ujar Bayu.

Bayu pun bercerita tentang pembekalan yang diberikan lembaga selama seminggu ketika awal masuk Lemhannas RI. “Saat pembekalan, selain diajarkan peraturan baris-berbaris (PBB), kita juga disuruh *push-up* dan segala macam. Pada dasarnya saya melihat semua itu sebagai hal yang positif untuk kedisiplinan kendati mungkin pendekatannya bisa lebih diperhatikan.

Pegawai yang bermotokan halal, legal, *action* mengaku tidak terlalu menyukai politik. “Perhatian saya lebih ke bisnis”, ujarnya sambil tertawa. “Bukannya apatis, tapi saya melihat sendiri bagaimana kondisi politik belakangan ini, saling serang, saling jegal, itu sungguh sangat disayangkan. Namun begitu ia tetap berharap agar warga negara yang memiliki hak pilih tetap menggunakan hak suara mereka.



Mohammad Hanief S.E., M.M.
Alumni PPRA L

Jiwa Nasionalisme yang Dimiliki Para Atlet Sangat Besar

Terkait suksesi pimpinan nasional, alumni PPRA 50 Tahun 2013, Mohammad Hanief SE, MM. menegaskan Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang dapat benar-benar mengerti terhadap permasalahan yang terjadi pada dunia olahraga Indonesia.

Permasalahan yang dimaksud oleh Hanief tersebut adalah buruknya pola pembinaan atlet Indonesia, bukan masalah dana semata. Menurutnya, pola pembinaan itu haruslah dimulai semenjak usia muda. Sehingga kelak atlet tersebut mampu menghasilkan prestasi, dan dengan prestasinya dia akan mendapatkan kemudahan dalam mencari pekerjaan.

Selain itu, pimpinan nasional mendatang juga harus memperhatikan kesejahteraan atlet Indonesia, supaya nantinya mereka tidak kebingungan dengan nasib dan masa depan, karena sudah mendapat jaminan dari pemerintah. Perhatian terhadap dunia olahraga memang sangat penting, mengingat jiwa nasionalisme yang dimiliki oleh atlet sangatlah besar. Mereka adalah orang yang berjuang demi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Ketua komisi dana dan usaha Pengurus Besar Taekwondo Indonesia Koni pusat ini juga menjelaskan sebaiknya pimpinan nasional mendatang haruslah seseorang yang mempunyai rekam jejak yang jelas, dan memiliki prestasi. "Olah raga harus menjadi fokus perhatian pemerintah. Karena ketika seorang atlet menjadi juara di sebuah pertandingan olah raga, maka secara otomatis bendera merah putih akan berkibar," pungkas Hanief.



Dr. Ir. Agus Heri Purnomo, M.Sc.

Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi KP. Balitbang Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
Alumni PPRA L

Mencari Pemimpin yang Kreatif dan Inovatif

Menurut Dr. Ir. Agus Heri Purnomo, M.Sc., salah satu kendala dalam mewujudkan majunya ekonomi berbasis maritim di Indonesia adalah pemimpin yang masih sangat berorientasi ke darat. Besarnya nilai investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan sektor ini menjadi kendala lain, sehingga sektor ini tidak bisa bila hanya mengandalkan dana dari pemerintah, juga menarik para investor untuk menanamkan modalnya.

"Setidaknya saat ini ada dua hal yang bisa pemerintah lakukan untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan, pertama memberikan bobot program dan penganggaran yang lebih besar pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan, dan kedua menanamkan kebanggaan sebagai bangsa maritim pada seluruh masyarakat Indonesia," ucap Alumni PPRA 50 ini

Untuk mendongkrak nilai jual dan menarik berbagai investor untuk menanamkan modalnya di ranah kelautan dan perikanan, seorang pemimpin harus berani untuk mengembangkan produk-produk berbasis kelautan yang khas Indonesia yang mempunyai daya saing dan keunggulan di pentas global.

Kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko sekaligus peluang menjadi karakter yang dibutuhkan oleh bidang kelautan dan perikanan saat ini. Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi KP. Balitbang Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI mengatakan bahwa, "Seorang pemimpin nasional sudah sepantasnya memberi prioritas yang lebih tinggi pada wilayah-wilayah tertinggal untuk mengoptimalkan aset sosial dan aset alam untuk mencapai perkembangan teknologi kelautan yang lebih merata."



Ir. Justarina Sinta Marisi Naiborhu, M.M., M.Sc.
Anggota Kadin Pusat
Alumni PPRA L

Pembangunan Infrastruktur Demi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

“Untuk meningkatkan ekonomi Indonesia di masa depan, pemerintah masih harus banyak membangun infrastruktur, seperti listrik dan sistem transportasi yang baik demi kelancaran proses produksi dan distribusi,” ucap Ir. Justarina Sinta Marisi Naiborhu, M.M., M. Sc. saat berbicara tentang hal-hal yang harus dilakukan jajaran pemerintahan yang baru saja terpilih untuk lima tahun ke depan.

Menurut Alumnus Program Pendidikan Reguler Angkatan 50 Lemhannas RI ini, pemerintah harus mengeluarkan pengeluaran yang cukup besar dalam pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan industri dan pada akhirnya akan menyerap banyak tenaga kerja yang produktif.

Saat membicarakan industri kreatif dan industri rumahan, Anggota Kamar Dagang Indonesia ini berpendapat bahwa yang dibutuhkan oleh jenis industri tersebut adalah bantuan modal dengan proses mudah. Hingga saat ini, banyak usaha kecil dan rumahan yang dirintis tetapi akhirnya tidak dapat berkembang dan bertahan karena kurangnya modal usaha. Bantuan modal yang disediakan oleh bank-bank di Indonesia saat ini masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku industri kecil karena prosesnya yang rumit dan harus adanya jaminan yang menjadi syarat utama dalam pengajuan.

“Industri rumahan perlu satu bank yang khusus memberi kredit untuk UKM. Bank yang bisa membantu memberikan kredit kepada usaha kecil yang tidak memiliki collateral. Untuk mewujudkan itu, bank harus mempunyai tim khusus untuk mengetahui nature dan karakter dari bisnis UKM yang mengajukan kredit,” tutupnya.



Tarman Azzam
Ketua Dewan Kehormatan PWI
Alumni PPRA IIVII

Pemimpin yang Mampu Memberikan Teladan

“Persoalan di Indonesia saat ini adalah persoalan multidimensi,” tutur Tarman Azzam alumni PPRA angkatan ke-27. Pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI tersebut mengatakan bahwa untuk mengatasi berbagai persoalan multidimensi tersebut, pemimpin Indonesia saat ini harus mampu membangun semangat cinta tanah air, kesederhanaan, dan nasionalisme.

“Setelah rasa bangga pada bangsa itu tumbuh, maka pemimpin yang baik dapat mengajak untuk bersama-sama membangun negara,” Tarman menambahkan. Bagi Tarman, pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu mengajak dan memberikan teladan, bukan memerintah.

“Kita bisa belajar pada negara Tiongkok ketika Deng Xiao Ping mengubah jumlah penduduk yang besar dari beban selama berabad-abad, dan kini menjadi kekuatan. Indonesia-pun memiliki jumlah penduduk yang besar, namun sayangnya pemerintah Indonesia masih belum bisa mengubah jumlah penduduk yang besar menjadi kekuatan,” imbuh Tarman.

“Tantangan pemimpin Indonesia ke depan harus mampu mengubah masyarakat yang apatis, tidak disiplin dan etos kerja lemah dengan memberikan teladan dari dirinya sendiri, yang mau bekerja keras dan berkomitmen hebat dalam menolong rakyat, sehingga ia dicintai oleh rakyat,” kata Tarman.



Resensi Buku

Judul : **Jejak Para Pemimpin**
Penyunting : Imran Hasibuan
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Tahun Terbit : 2014
Tebal : 712 hlm.
ISBN 13 : 9786020305486
Bahasa : Indonesia

Jejak Para Pemimpin

Tak kenal, maka tak sayang, ungkapan tersebut lumrah dalam kehidupan keseharian kita untuk mengistilahkan sesuatu yang baru akan kita kenali. Demikian juga sebelum menjatuhkan pilihan terhadap seorang figur calon pemimpin. Anda harus mencari tahu terlebih dahulu bagaimana rekam jejak perjalanan para calon pemimpin kita.

“Jejak Para Pemimpin”, berawal dari gagasan yang paling pokok, bahwa dalam memilih pemimpin tak cukup hanya karena populer, tetapi perlu sejenak membuka rekam jejak (*track record*) dan visi-misi pemikiran seorang kandidat. Sejatinya rakyat membutuhkan pemimpin dan kepemimpinan paripurna, yang tak hanya mampu mensinergikan antara kata dan perbuatan (berintegritas), tetapi juga mampu mendiagnosa, menawarkan solusi sekaligus menggerakkan rakyat untuk bersama menyelesaikan segala problem kebangsaan. Karena itulah, mengupas perjalanan dan pengalaman para pemimpin mulai dari zero hingga hero menjadi relevan dan penting agar publik memiliki referensi yang cukup sebelum menentukan pilihan.

Jejak -jejak pemimpin akan menjadi cerita dan sejarah yang ditinggalkan, terkadang meninggalkan kesan yang dalam tentang kebaikan dan keburukan, yang bisa dijadikan evaluasi oleh para penerusnya kedepan, dan yang menarik dari seorang pemimpin yang amanah

dan terpercaya adalah saat dia didoakan oleh orang-orang yang dipimpinnnya agar bisa mengemban amanah atau sebaliknya seorang pemimpin yang dibenci hingga akhirnya dimusuhi karena tidak amanah.

Seorang pemimpin sejatinya memberikan ketauladanan, atau dapat diistilahkan : *leader is not create follower but leader create the next leader*. Itulah berarti bahwa suatu kepemimpinan juga berkaitan dengan regenerasi, seorang pemimpin juga akan mempersiapkan penerusnya dan memberikan ruang untuk penerusnya belajar dan terlibat dalam kepemimpinannya,

Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, mereka muncul dari serangkaian proses seleksi (formal atau informal), berinteraksi dengan masalah, konsistensi terhadap tanggung jawab, serta kematangan dalam mengambil keputusan. Karena itu, diperlukan kemampuan dan pengalaman yang cukup dalam menyikapi dan mengatasi berbagai persoalan.

Buku ini layak dibaca oleh siapa pun yang ingin menjadi pemimpin dan siap untuk dipimpin, karena esensi kepemimpinan adalah proses saling memberi dan menerima. Di dalam buku ini, ada begitu banyak pelajaran hidup dan kisah sukses (*success story*) inspiratif para pemimpin yang layak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Guru Kembar, Rossy dan Rian Menanamkan Budi Pekerti Kepada Anak-anak Jalanan

*Padamu negeri kami berjanji, Padamu negeri kami berbakti
Padamu negeri kami mengabdikan, Bagimu negeri jiwa raga kami*

Alunan suara angklung beriramakan lagu Padamu Negeri ciptaan Kusbini terdengar merdu pada siang itu. Terik matahari yang terasa menyengat kulit tidaklah menyurutkan semangat anak-anak sekolah dasar berseragam putih biru untuk memainkan alat musik tradisional Jawa Barat tersebut dengan penuh kekompakan. Bahkan, tidak nampak satu pun raut wajah mereka yang memperlihatkan rasa letih, meskipun jam sudah menunjukkan pukul 11.00 WIB.

Mereka adalah murid-murid Sekolah Darurat Kartini, yang didirikan oleh ibu guru kembar, Rossy & Rian. Sekolah ini berada di jalan Lodan Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Sekilas, bangunan sekolah tersebut terlihat tidak seperti layaknya gedung sekolah pada umumnya. Dari luar, bangunan itu lebih nampak seperti sebuah gudang pabrik. Hanya papan nama bertuliskan Sekolah Darurat Kartini yang dapat meyakinkan bahwa itu adalah sebuah sekolah.

Letaknya berada persis di sebelah tol Wiyoto-Wiyono. Luas bangunannya sekitar 15x20 meter persegi. Terdiri dari satu ruang utama yang luas, 3 kamar mandi, dan 1 dapur. Beratapkan asbes, membuat udara di dalam gedung sekolah itu terasa pengap walau terdapat kipas angin yang berputar kencang. Pada ruang utama inilah semua aktivitas belajar mengajar dilakukan. Semua barang inventaris sekolah juga berada di ruang utama, mulai dari lemari beserta buku-buku sekolah, papan tulis, obat-obatan, hingga berbagai alat musik, seperti gendang, dan angklung.

Rossy & Rian mendirikan Sekolah Darurat Kartini sejak 1990. Asal mula mendirikan sekolah ini berawal dari keprihatinan mereka terhadap anak jalanan dan anak terlantar. "Mereka kan warga negara Indonesia juga, kalo tidak dibina kan jadi preman semua, pelacur semua, kriminal semua," jelas Rossy dengan raut wajah prihatin. Selama ini, Sekolah Darurat Kartini

sudah 6 kali berpindah tempat karena mengalami pengusuran. Tanah tempat bangunan yang berdiri saat ini adalah hibah dari PT. KAL. "Waktu pindah itu pinjam tenda tentara, kita dibantu Kopassus mendirikan sampai 5 tenda," terang Rossy & Rian dengan kompak.

Sekolah ini memiliki jenjang pendidikan yang lengkap, mulai



dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMK. Semua murid yang bersekolah di Sekolah Darurat Kartini mendapatkan pendidikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Bahkan Rossy & Rian juga memberikan makan siang gratis, serta memenuhi semua kebutuhan dasar mereka, seperti seragam, dan sepatu sekolah. "Kita kasih makan, habis itu kita kasih beras sebulan sekali kira-kira 2,5 kg, baju, sama sepatu. Kita tidak memberi uang, supaya mereka mau sekolah," ujar Rian dengan wajah serius.

Merogoh kocek pribadi

Menurut Rossy & Rian, sekolah yang telah berdiri selama 24 tahun tersebut memiliki siswa kurang lebih sebanyak 2033 orang. Terhitung sejak 2006, karena seringkali mengalami pengusuran menjadikan siswa Sekolah Darurat Kartini sekarang ini hanya berjumlah sekitar 600 orang. Selain anak jalanan, dan anak ter-

lantar, di sekolah ini juga terdapat anak atlit, dan anak-anak yang berasal dari kawasan Indonesia bagian timur. Mereka berdua kerap kali mendapat informasi dari personel TNI yang bertugas di daerah pedalaman, untuk kemudian membawa serta anak-anak pedalaman tersebut ke Jakarta guna mendapat pendidikan yang layak di Sekolah Darurat Kartini.

Kegiatan mengajar anak-anak tidak mampu ini sudah dimulai sejak Rossy ikut bersama suami yang berprofesi sebagai dokter kandungan berdinis di daerah pedalaman Kalimantan Timur. Kesempatan itu dipakai Rossy untuk mengajar baca tulis kepada warga yang masih buta huruf. Begitu juga dengan Rian, yang mulai mengajar baca tulis kepada warga tidak mampu sejak ikut suami yang berprofesi sebagai perwira TNI-AL berdinis di Lombok. "Saya dari Lombok sudah mengajar orang-orang tidak mampu, waktu suami

saya pangkatnya letnan. Terus ke Bali, Surabaya, baru di Jakarta," pungkas Rian dengan semangat.

Kesamaan minat dalam mengajar baca tulis inilah yang akhirnya membuat Rian pada 1996 menyusul saudari kembarnya yang terlebih dahulu menetap di Jakarta untuk bersama-sama mengelola Sekolah Darurat Kartini. Mereka ingin agar anak-anak kurang mampu itu kelak memiliki keahlian dalam bekerja, setelah lulus nanti. Bahkan lulusan sekolah ini juga memiliki ijazah resmi dari Kementerian Pendidikan. Setiap tahunnya, Rossy & Rian mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1,1 juta/orang agar anak didiknya bisa mengikuti ujian nasional, dan memperoleh ijazah kelulusan. Saat ini, ada murid mereka yang telah berhasil menjadi Kopassus.

Mengenai biaya operasional Sekolah Darurat Kartini, Rossy & Rian mengatakan bahwa selain merogoh



tempo.com

kocek pribadi mereka juga mendapat bantuan para donatur, seperti dari Kopassus, dan Gereja. "Ini uang saya sendiri. Saya punya rumah sakit, sebagian dari uang pendapatan saya itu untuk mengelola ini. jadi saya tidak amal ke masjid, ke anak yatim, amal saya ya ini," tandas Rossy sambil tersenyum. Ditambahkan oleh Rian selain itu mereka juga punya sawah. Hasil panen sawah mereka itulah yang nantinya digunakan untuk memberi beras kepada murid-murid di sekolah tersebut.

Sudah menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini

Wanita kembar identik kelahiran Yogyakarta, 4 Februari 1950 ini juga memiliki visi dan misi yang sama dalam mendirikan Sekolah Darurat Kartini. Mereka berdua ingin mencerdaskan anak-anak bangsa. Tidak hanya dari sisi akademis saja, berharap lulusan Sekolah Darurat Kartini kelak akan memiliki budi pekerti yang luhur. Walaupun anak-anak didiknya hanya bersekolah di kolong jembatan, tetapi Rossy & Rian ingin agar murid-muridnya menjadi manusia berakhlak.

Mereka juga merasa prihatin dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini yang kerap kali diwarnai oleh aksi tawuran antar pelajar. "Itu yang salah gurunya. Disini ini kan orang gelandangan, bapaknya pembunuh, maling, keluar masuk penjara, tapi mana ? saya didik tidak ada yang tawuran," imbuh Rian & Rossy dengan antusias. Menurut mereka, cara mendidik yang tepat adalah dengan menggunakan pendidikan karakter berbasis terapan. Cara yang digunakan dalam mendidik anak haruslah berbeda, tidak dapat disamakan. "Kalo mendidik anak marjinal begini, anak orang kaya begini. Karakter itu harus diberikan sejak dari pendidikan anak usia dini, bukan setelah dewasa," tutur Rossy & Rian.

Sekolah Darurat Kartini juga mengajarkan murid-muridnya mengenai toleransi antar umat beragama.



Untuk pendidikan agama, Rossy & Rian menitipkan anak didiknya yang beragama Kristen dan Katholik ke gereja. "Saya kan Islam, jadi anak-anak yang Kristen dan Katholik ya saya titipkan sama romo, sama pendeta, kalau mereka tidak ke gereja ya saya marahin, saya nasehati dia," jelas Rian sembari mengayunkan rotannya ke atas meja.

Mengenai suksesi pimpinan nasional yang sebentar lagi akan diselenggarakan, Rossy & Rian mengatakan mereka akan mendukung presiden dan wakil presiden yang tidak maling alias tidak korupsi, termasuk jajaran menteri-menterinya. Mereka juga akan mendukung presiden dan wakil presiden yang berpihak kepada masyarakat, dan mendidik masyarakat. Watak presiden dan wakil presiden tersebut haruslah dibangun supaya menjadi orang Indonesia yang bermartabat.

Banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh presiden dan wakil presiden mendatang. Salah satunya adalah permasalahan akte kelahiran bagi anak-anak terlantar, seperti yang telah mereka bina selama ini. Dengan tidak adanya akte kelahiran, anak-anak jalanan tersebut tidak akan bisa mendapatkan berbagai fasilitas dan bantuan dari pemerintah. "Kami juga Tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka tidak punya akte kelahiran.

Mereka kan kalo punya akte diberikan fasilitas BOS, jamkesmas, beras miskin, ini mereka tidak dapat semua karena mereka tidak punya akte," ujar Rossy dengan raut muka sedih.

Selain itu, jika seorang anak tidak memiliki akte, dikhawatirkan mereka akan selamanya menjadi gelandangan, karena sulitnya menyelesaikan berbagai urusan yang menyangkut kependudukan. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di daerah perkotaan saja, tetapi juga menjadi kendala di daerah perbatasan. "Anak pedalaman kan tidak punya akte kelahiran, yang di daerah perbatasan makanya lari, karena dapat akte dari Malaysia. Kependudukannya harus dirubah," urai Rian menambahi ucapan Rossy.

Dari banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan, Rian & Rossy berharap agar pemerintahan mendatang tidak hanya melulu soal partai saja. Menurut mereka berdua, semua warga negara Indonesia berhak untuk memiliki identitas. Karena negara bermartabat adalah gengsi sebuah negara, dan untuk menjadi sebuah negara bermartabat harus dimulai dari adanya kejelasan identitas seluruh warga negaranya. "Kalau rakyatnya tidak berakte, apa negaranya tidak ambruk ?" seloroh Rossy & Rian sambil menutup kegiatan belajar mengajar di Sekolah Darurat Kartini siang itu.

Kisah Lima Sekawan



www.businessland.gr

Alkisah lima sekawan sedang dalam perjalanan menuju pusat kecamatan untuk suatu urusan. Ketika sedang berjalan di sepanjang tepian sungai, mereka tiba-tiba dikelilingi oleh selusin perampok yang sengaja menanti setiap pelancong di balik semak belukar untuk menyerang mereka. Empat orang dari lima sekawan tersebut ketakutan. Tetapi seorang dari mereka, Buyung, adalah seorang yang kecil tapi kuat. Ia juga lihai bersilat, sehingga dijuluki Jenderal Buyung. Dialah pemimpin dari lima sekawan tersebut.

Buyung meminta kepada teman-temannya untuk tidak panik, dan tetap berdiri di tempatnya masing-masing, sementara ia seorang diri akan menghadapi para perampok itu. Hingga sejeurus kemudian Buyung pun bertarung tanpa rasa takut,

menghajar para perampok itu dengan tangan kosong, dan berhasil mematahkan tangan beberapa perampok tersebut. Tak lama berselang, semua perampok itu pun terkapar di tanah.

Teman-temannya kemudian melaporkan hal itu ke kantor polisi terdekat, yang berlokasi agak jauh dari tempat kejadian tersebut. Pada saat polisi tiba di tempat kejadian, kebanyakan perampok itu masih terkapar di tanah, mengeluh kesakitan.

Keempat orang temannya sangat berterima kasih kepada Buyung. "Terima kasih banyak! Jika tidak bergian dengan kau, kami mungkin tak akan selamat sampai di tujuan."

"Tidak sama sekali," jawab Buyung. "Kalau aku sendirian, aku mungkin tidak akan menang. Dengan keyakinan bahwa kalian berdiri di

belakangku, aku menjadi tidak khawatir akan adanya orang yang akan menyerangku dari belakang. Meskipun kalian tidak berkelahi, keberadaan kalian memberi banyak keberanian kepadaku. Itulah sebabnya aku dapat mengalahkan mereka."

Organisasi dan Kepemimpinan

Kisah lima sekawan tentunya menjadi sebuah kisah menarik untuk kita renungkan bersama. Di dalam menyikapi hubungan pemimpin dengan anak buah, sangatlah elok jika terjalin hubungan yang erat di antara keduanya. Apa yang telah diucapkan oleh Buyung, adalah sebuah gambaran betapa seorang pemimpin dengan anak buahnya adalah ibarat dua sisi mata uang. Secara struktural, pemimpin dan yang dipimpin adalah dua hal yang berbeda. Namun

demikian, tiadalah sebuah mata uang akan menjadi berharga apabila kedua sisinya tak menyatu. Dua sisi tersebut seyogyanya saling melengkapi, mengisi kekurangan masing-masing, guna mewujudkan apa yang telah dicita-citakan bersama.

Komunikasi yang baik adalah penting dalam menjalin hubungan tersebut. Seorang pemimpin yang bagus seharusnya mampu menjalin komunikasi dengan anak buahnya untuk menciptakan rasa saling percaya. Ketika pemimpin memperlakukan anak buah selayaknya anak sendiri, niscaya mereka akan berada di sekelilingnya di mana pun pemimpin itu berada. Pada saat yang sama, ia harus menjalankan otoritasnya dan selalu konsisten. Ia dapat dimusuhi anak buahnya jika ia menghukum mereka, sebelum anak buahnya mendapat kesempatan untuk mengenalnya dan membangun rasa percaya kepadanya. Hal ini dapat mengacu kepada ketidaksetiaan.

Seorang pemimpin yang baik adalah orang yang tahu kapan harus bertindak tegas dan kapan harus mentoleransi kekhilafan, orang yang mengetahui bagaimana mengorganisir anak buahnya, serta orang yang dengan sepenuh hati melindungi anak buahnya. Anak buah harus percaya penuh kepada pemimpinnya.

Seorang pemimpin tidak akan mendapatkan anak buah yang berkualitas apabila ia tidak serius menuntut kepatuhan anak buahnya, atau jika pemimpin itu gagal menekankan disiplin kepada anak buahnya. Di antara pemimpin dan anak buah, bukti dari kesetiaan harus dikombinasikan dengan penekanan kedisiplinan.

Seorang pemimpin yang kuat dengan anak buah yang lemah, atau seorang pemimpin yang lemah dengan anak buah yang kuat, adalah awal kegagalan. Ia harus tenang, berpikiran sehat, disiplin, dan adil. Ketika menghadapi ketidakpastian, ia seharusnya memiliki fleksibilitas untuk



www.123rf.com

mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan.

Perencanaan yang cermat

Membuat rencana yang cermat adalah syarat utama agar target tercapai. Pencapaian target harus terjamin sebelum seorang pemimpin memberikan sebuah target. Semakin cermat seorang pemimpin membuat rencana pada target yang ingin dituju, maka kemungkinan untuk tercapainya target tersebut akan semakin besar. Perencanaan yang kurang cermat akan menurunkan peluang tercapainya target. Tidakkah ada rencana untuk gagal dalam mencapai target. Dalam hal ini, tercapainya sebuah target dapat terlihat dari bagaimana cermatnya suatu perencanaan.

Seorang pemimpin harus menyusun beberapa skenario yang berbeda, kemudian merencanakan aksinya dan mengantisipasi kendala dengan baik, memperhitungkan setiap faktor, baik faktor yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan. Dalam kondisi yang menguntungkan, ia tidak mengabaikan faktor negatif, dengan demikian ia akan meyakinkan bahwa pencapaian target dapat tercapai. Dalam kondisi sebaliknya, ia

janganlah kehilangan faktor positif, agar ia dapat mempertahankan kepercayaan dirinya.

Penempatan

Bagian yang paling sulit dalam pengaturan formasi struktural anak buah adalah penempatan. Kadang kala penempatan yang benar mungkin tidak akan menghasilkan manfaat langsung, tetapi hal itu akan menjadi keuntungan jangka panjang. Seorang pemimpin yang bijaksana seharusnya mempunyai kemampuan untuk menyadari apa yang menjadi tujuan jangka panjang dalam mencapai target keseluruhan.

Namun demikian, Seorang pemimpin tidak akan sukses jika hanya menekankan pada pencapaian target semata. Pemimpin yang baik akan menciptakan kondisi di mana anak buahnya dapat memperoleh keuntungan, bukan meminta sesuatu yang tidak realistis pada mereka. Jika pemimpin mempunyai strategi yang baik, ingatlah bahwa dia harus menciptakan kondisi sedemikian rupa untuk membantu penerapan strategi. Keteraturan atau kekacauan, keberanian atau ketakutan, kekuatan atau kelemahan, adalah hasil dari penempatan.



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., menerima Kepala BKKBN di ruang Tamu kerja Pimpinan Lemhannas RI, Jumat (14/3).



Foto bersama Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., didampingi Wagub Lemhannas RI Marsdyia TNI Dede Rusamsi, SE dan Mayor General Simone Wikie, AM dalam rangka kunjungan Tamu CDSS Australia di Gd. Depan Tri Gatra, Selasa (8/4).



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., menerima Taklimat Akhir dari Ketua Tim BPK RI di ruang rapat Pimpinan, Kamis (10/4).



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., menerima Bapak Lukman Mahmud Presiden IPA di Ruang Tamu Gubernur, Rabu (16/4).



Foto bersama Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., dengan Atase Pertahanan Perancis di Gd. Depan Trigatra, Kamis (17/4).



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., membuka Dialog Kebangsaan Dengan Kalangan Media Angkatan II di Gedung Dwi Warna, Senin (28/4).



Seminar Bilateral II yang merupakan kerjasama antara Lemhannas RI dengan IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale) Perancis diselenggarakan pada hari Selasa (6/5) .



Pembukaan Outbound P3DA Angkatan VIII oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Muda TNI Dede Rusamsi, S.E. di gedung Trigatra Lantai 3 Timur, Rabu (7/5).



Roundtable Discussion dengan tema **"Dampak Eksploitasi Sumber Daya Alam Tambang terhadap Nilai Tambah Ekonomi Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional"** di ruang Kresna Gd. Asta Gatra Lt. 4, Kamis (22/5).



Foto bersama Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., dengan Mantan Gubernur, Wakil Gubernur Lemhannas RI, beserta Para Istri di Ruang Hening Pimpinan, Senin (26/5).



Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Ewa Polano bersama stafnya memenuhi undangan makan malam dengan Gubernur Lemhannas Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., Senin (16/6) di Gd. Trigatra Lemhannas RI.



Poto Bersama Duta Besar Perancis Madame Corinne Breuzé dengan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., pada acara gala diner di Gd. Trigatra Lt.III, Kamis(26/6).

Rencana Jadwal Kegiatan Program Penting Lemhannas RI

Deputi Pendidikan

1. PPRA LI

- a. 30 Juni – 4 Juli: Laks SSDN
- b. 10 - 11 Juli: Lap SSDN
- c. 28 Juli – 1 Agustus: Cuti Bersama
- d. 12 Agustus: Direktif Propil
- e. 14 Agustus: Rakor SSLN
- f. 15 Agustus: Kesiapan SSLN
- g. 19 Agustus: Penjelasan Dedik OS
- h. 28 Agustus: Kuliah Umum RI - 2
- i. 1 – 5 September: Laks SSLN
- j. 8 September: Penjelasan Dedik Propil
- k. 9 – 10 September: Lap SSLN
- l. 11 September: Tar Wasdal OS
- m. 12 September: Tar Pelaku OS
- n. 12 September: Laks Propil
- o. 16 – 19 September: Laks OS
- p. 23 – 25 September: Saji Taskap

2. PPRA LII

- a. 1 – 2 Juli: Laks POS
- b. 7 – 11 Juli: Tim Aju Budaya Lokal
- c. 17 Juli: Lap Siap Budaya Lokal
- d. 14 – 18 Juli: Tim Aju SSDN
- e. 28 Juli – 1 Agustus: Cuti Bersama
- f. 6 Agustus: Rakor SSDN
- g. 7 Agustus: Kesiapan SSDN
- h. 18 – 22 Agustus: Laks SSDN
- i. 21 – 23 Agustus: Pengenalan Budaya Lokal
- j. 26 – 27 Agustus: Lap SSDN
- k. 28 Agustus: Kuliah Umum RI – 2

3. P3DA VIII (Program Pemantapan Pimda Angkatan VIII)

- a. 9 Juli: Rakor SSLN
- b. 14 – 16 Juli: Laks SSLN
- c. 21 Juli: Lap SSLN
- d. 22 – 23 Juli: Penyajian KKP
- e. 24 Juli: Tup.

Deputi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Bulan Agustus Dan September T.a. 2014

1. Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Kalimantan Selatan
2. Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Kalimantan Tengah
3. Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Sumatera Utara
4. Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lampung.



Penyerahan wayang pada dalang Ki H. Manteb Soedharsono sebagai penanda dimulainya Pagelaran Wayang Kumbakarna Gugur



ISSN 2252-9659



9 772252 965956